

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTEK JUAL
BELI POHON KARET DENGAN SISTEM TANGGUH
(Studi Kasus di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang
Bawang)**



Skripsi

Diajukan untuk Melengkapi Tugas-tugas dan Memenuhi Syarat-syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H) Dalam Program Studi Muamalah

Oleh:

ARMAN SAIBANI

NPM : 1421030299

Program Studi : Mu'amalah

**FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN LAMPUNG
1439 H/ 2018 M**

ABSTRAK

Jual beli pohon karet yang berlangsung di Desa Tunggal Warga telah di praktekkan menurut kebiasaan yang sudah berlaku sejak lama di tengah masyarakat. Akan tetapi Islam mengatur umatnya tentang tata cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari.

Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung dan bagaimana tinjauan Hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh. Tujuan diadakannya penelitian ini adalah untuk mengungkap permasalahan mengenai Tinjauan Hukum Islambn Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (*field reseach*) yang di analisa dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif. Sampel diambil dengan menggunakan total sampling yakni seluruh penjual dan pembeli pohon karet yang ditangguhkan agar permasalahan ini dapat dipaparkan dengan lenih jelas, instrumen penelitian yang digunakan adalah interview, observasi dan dokumentasi. Analisis data dilakukan melalui tiga langkah yakni reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.

Berdasarkan penelitian dapat diketahui bahwa praktek jual beli pohon karet dengan sistem tangguh yang terjadi di Desa Tunggal Warga, sudah menjadi tradisi dimana dalam transaksi jual beli pohon karet tersebut dimana dalam sering hanya menggunakan kwitansi pembelian bahkan ada yang hanya dengan lisan. Selain itu, terdapat unsur kerugian dari salah satu pihak dan tidak adanya kejelasan terhadap ukuran dan waktu penangguhan secara pasti. Ditambah lagi transaksi jual beli pohon karet dengan sistem tangguh tersebut sangat dimungkinkan adanya kerusakan atau kekurangan pada barang ataupun kerusakan yang terjadi disekitar penebangan pohon karet tersebut. dari segi ukuran atau takarannya pun hanya mengira-ngira dan menyamakan keseluruhan dengan satu harga meskipun besar ataupun kecil pohon karet tersebut. Menurut pandangan hukum Islam dapat dipahami bahwa, pelaksanaan jual-beli pohon karet dengan sistem tangguh yang terjadi di Desa Tunggal Warga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam Islam. Dalam hal kejelasan barangnya, dan dalam akad perjanjiannya. Oleh karena itu, praktek jual beli ini sudah seharusnya untuk di hindari menurut hukum Islam.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. Ht. Endro Suratmin Sukarame 1 Bandar Lampung Telp (0721)703289

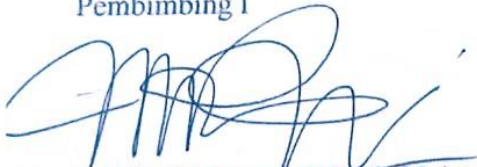
PERSETUJUAN

Nama : Arman Saibani
NPM : 1421030299
Jurusan : Muamalah
Fakultas : Syariah
Judul Skripsi : **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)**

MENYETUJUI

Untuk di munaqosahkan dan dipertahankan dalam sidang munaqosah
Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung.

Pembimbing I


Drs. H. Mohammad Rusli, M.Ag.
NIP. 19592151986031004

Pembimbing II


Hj. Nurnazli, S.H., S.Ag., M.Ag.
NIP. 197111061998032005

Ketua Jurusan Muamalah,


Dr. H.A. Kurnedi Ja'far, S.Ag., M.H.
NIP. 197208262003121002



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN INTAN
LAMPUNG
FAKULTAS SYARIAH**

Jl. Let. Kol. Ht. Endro Suratmin Sukarame I Bandar Lampung Telp (0721)703289

PENGESAHAN


Skripsi dengan judul: **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus di Desa Tunggal Warga Kec. Banjar Agung Kab. Tulang Bawang)** disusun oleh : **Arman Saibani**,
NPM : **1421030299**, Jurusan : **Muamalah**, telah diujikan dalam sidang Munaqasyah Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung pada hari/tanggal :

TIM DEWAN PENGUJI

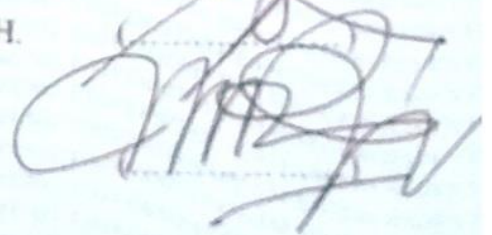
Ketua : Drs. H. Ahmad Jalaluddin, S.H., M.M.

()

Sekretaris : Herlina Kurniati, SHL., M.E.I.

()

Penguji I : Dr. H. A. Khumaidi Ja'far, S.Ag. M.H.

()

Penguji II : Drs. H. Mohammad Rusfi, M.A.g.

Dekan Fakultas Syariah

Dr. Alamsyah, S.Ag., M.Ag.
NIP. 197009011997031002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدِينٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”
(Q.S. Al-Baqarah (2) : 282).¹



¹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, hlm. 153.

PERSEMBAHAN

Karya tulis ini dipersembahkan pada seseorang yang selalu mendukung akan terselesaikannya karya ini, diantaranya :

1. Kepada orang tuaku Bapak Pujiono dan Ibu Sumiarsih yang telah mendidik dan membesarkanku dengan do'a dan kasih sayang beliau, serta dukungan moral, spiritual dan materi, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
2. Kakakku Lingga Roman S.E, dan kedua adikku Emiliana Putri dan Apriliana Ayu Elita yang selalu memberi semangat dan do'a, serta selalu memberikan pertolongan dengan ikhlas sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

RIWAYAT HIDUP

Nama lengkap Arman Saibani, dilahirkan pada tanggal 16 Februari 1995 di Desa Tunggal Warga Tulang Bawang. Putra kedua dari empat bersaudara, buah perkawinan pasangan Bapak Pujiono dan Ibu Sumiarsih

1. SDN 01 Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sejak tahun 2001-2007.
2. SMPN 02 Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sejak tahun 2007-2010
3. SMK HMPTN Banjar Agung, Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, sejak tahun 2010-2013
4. IAIN Raden Intan Lampung, Fakultas Syari'ah dengan mengambil program studi Mu'amalah (Hukum Ekonomi Syari'ah), tahun 2014.

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil 'alamiin

Puji syukur kehadiran Allah SWT. Yang senantiasa memberikan rahmat dan hidayah-Nya sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan penuh semangat dan kelancaran, Engkaulah faktor utama dalam keberhasilan penulisan skripsi ini. Selanjutnya shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, yang merupakan uswatun hasanah atau suri tauladan bagi seluruh umat manusia di muka bumi ini.

Dengan telah terselesaikannya skripsi ini yang berjudul “**Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh**”. Proses penyusunan skripsi ini tidak akan berhasil tanpa dukungan dari semua pihak dengan berbagai bentuk kontribusi yang diberikan, baik secara moril ataupun materil. Dengan kerendahan dan ketulusan hati mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Moh Mukri, M. Ag, selaku rektor UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan kesempatan untuk menimba ilmu di kampus tercinta ini.
2. Dr. Alamsyah, S. Ag., M. Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung, yang telah memberikan berbagai kebijakan untuk memanfaatkan segala fasilitas di Fakultas Syariah.
3. Dr. H.A Khumedi Ja'far, S.Ag., M.H., dan Khoiruddin, M.S.I selaku Ketua Jurusan Mu'amalah dan Sekretaris Jurusan Mu'amalah Fakultas Syariah

UIN Raden Intan Lampung yang telah memberikan arahan, serta bimbingan dalam penyelesaian skripsi ini.

4. Drs. H. Mohammad Rusfi, M.Ag. selaku Pembimbing I dan Hj. Nurnazli, S.H.,S.Ag., M.Ag. selaku Pembimbing II yang dengan penuh kesabaran dan telah banyak memberikan arahan, bimbingan, serta memberikan masukan yang sangat berarti dan membangun atas penyelesaian skripsi ini.
5. Seluruh dosen Fakultas Syariah UIN Raden Intan Lampung dan Bapak dan Ibu staf karyawan perpustakaan syariah dan perpustakaan pusat UIN Raden Intan Lampung yang telah banyak memberikan pelajaran dan pengajaran sehingga dapat mencapai akhir perjalanan di kampus UIN Raden Intan Lampung.
6. Pihak penjual dan pembeli pohon karet di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yang telah bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini.
7. Rekan-rekan Muamalah A T.A 2014 yang senantiasa mendukung penulisan skripsi ini.
8. Sahabat seperjuangan sehingga penulis menjadi sarjana hukum, Ardiansyah Aristama, Luxe Herlianty, Yogi, M. Budi Pratama, Nazela dan tidak lupa Ropiq Rohmawati yang telah setia membimbing, menasehati, dan selalu memberikan semangat dorongan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

9. Almamater tercinta Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Raden Intan Lampung yang telah mendidik, mengajarkan dan mendewasakan dalam berfikir dan bertindak secara baik

Semoga amal baik kalian mendapat balasan dari Allah SWT. Pada akhirnya menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu diharapkan masukan baik berupa saran maupun kritik demi kelengkapan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. *Amin ya Robal' Alamin.*

Bandar Lampung, 04 September 2018
Penulis,



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Arman Saibani
NPM.1421030299

DAFTAR ISI

| | |
|---------------------------|------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| ABSTRAK | ii |
| HALAMAN PERSETUJUAN | iii |
| HALAMAN PENGESAHAN | iv |
| MOTTO | v |
| PERSEMBAHAN | vi |
| RIWAYAT HIDUP | vii |
| KATA PENGANTAR | viii |
| DAFTAR ISI | xi |

BAB I PENDAHULUAN

| | |
|--|----|
| A. Penegasan Judul | 1 |
| B. Alasan Memilih Judul | 3 |
| C. Latar Belakang Masalah | 4 |
| D. Rumusan Masalah | 8 |
| E. Tujuan Dan Manfaat Penelitian | 9 |
| F. Metode Penelitian | 10 |

BAB II JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

| | |
|---|----|
| A. Konsep Jual Beli Dalam Islam | |
| 1. Pengertian Jual Beli | 18 |
| 2. Dasar Hukum | 20 |
| 3. Rukun dan Syarat Jual Beli | 24 |
| 4. Macam-macam Jual Beli | 31 |
| B. Jual Beli Dengan Sistem Tangguh (<i>Bai' bidhamani Ajil</i>) | |
| 1. Pengertian <i>Bai' bidhamani Ajil</i> | 36 |
| 2. Dasar Hukum | 37 |

| | |
|---|----|
| 3. Pendapat Ulama Tentang <i>Bai' bidhamani Ajil</i> | 40 |
| 4. Prinsip-prinsip Jual Beli <i>Bai' bidhamani Ajil</i> | 41 |

BAB III PRAKTIK JUAL BELI POHON KARET

| | |
|--|----|
| A. Gambaran Umum Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang. | |
| 1. Sejarah Desa | 47 |
| 2. Keadaan Demografi | 51 |
| B. Sistem Jual Beli di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang | 56 |
| C. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pohon Karet di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang | 58 |
| D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sistem Tangguh Dalam Jual Beli Pohon Karet Tersebut | 61 |



BAB IV ANALISIS DATA

| | |
|--|----|
| A. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pohon Karet dengan Sistem Tangguh | 63 |
| B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang | 66 |

BAB V PENUTUP

| | |
|---------------------|----|
| A. Kesimpulan | 74 |
| B. Saran | 75 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN LAMPIRAN

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Penegasan Judul

Sebelum mengadakan pembahasan lebih lanjut tentang skripsi ini, terlebih dahulu akan di jelaskan pengertian judul guna mendapatkan informasi dan gambaran yang jelas serta memudahkan dalam memahami skripsi ini, sebab judul merupakan kerangka dalam bertindak, apalagi dalam suatu penelitian ilmiah. Hal ini untuk menghindari penafsiran yang berbeda dikalangan pembaca. Maka perlu adanya suatu penjelasan dengan memberi arti beberapa istilah yang terkandung di dalam judul skripsi ini.

Penelitian yang akan di laksanakan ini adalah yang berjudul: **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh (Studi Kasus Di Desa Tunggal Warga Kec.Banjar Agung Kab.Tulang Bawang)”**. Untuk menghindari salah satu presepsi dan penafsiran terhadap judul yang di ajukan tersebut maka akan di uraian secara singkat istilah istilah yang terdapat dalam judul.

Yaitu:

1. Tinjauan, ialah hasil meninjau, pandangan, pendapat (sesudah menyelidiki, mempelajari, dan sebagainya).²
2. Hukum Islam

Hukum Islam adalah seperangkat peraturan berdasarkan wahyu Allah dan sunnah Rasul tentang tingkah laku manusia mukallaf yang

²Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*, (Balai Pustaka, 1990), h. 1198.

diakui dan di yakini berlaku dan mengikat untuk umat yang beragama islam.³ Dalam pengertian lain, Hukum Islam adalah sekumpulan ketetapan hukum kemaslahatan mengenai perbuatan hamba yang terkandung dalam sumber Al-Qur'an dan Sunnah baik ketetapan yang secara langsung ataupun tidak langsung.⁴

3. Praktik Jual Beli

Praktik, adalah pelaksanaan pekerjaan, perbuatan menerapkan teori.⁵ Jual beli secara bahasa berasal dari kata "al-bai" yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai' terkadang di gunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata nasy-syira' (beli). Dengan demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.⁶ Sedangkan menurut ulama Hanafiyah jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta cara khusus (yang dibolehkan).⁷

Praktik jual beli yang di maksud adalah praktik jual beli pohon karet yang terjadi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

³ Ismail Muhammad Syah, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bumi Aksara, 1999, h. 17.

⁴ Bunyana Sholihin, *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*, Yogyakarta : Kreasi Total Media, 2016, h. 11.

⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Op. Cit.*, h. 892.

⁶ Mahmud Yunus, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung, 2007, h. 56.

⁷ Rachmat, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2001, h. 74.

4. Sistem Tangguh

Sistem adalah susunan yang teratur dari pandangan , teori dan asas. Sedangkan Tangguh adalah menunda (waktu).⁸ Jadi yang dimaksud dengan sistem tangguh adalah sesuatu dengan disegerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan ditangguhkan pembayarannya.

Berdasarkan beberapa penjelasan di atas, maka dapat di tegaskan kembali bahwa yang di maksud dengan judul peneliti ini adalah suatu kajian secara ilmiah atas aturan-aturan yang di tetapkan oleh Allah Swt yang ditunjukan untuk mengatur perbuatan manusia dengan manusia lainnya yang berkaitan dengan urusan dalam pergaulan sosial masyarakat, khususnya tentang sebuah peristiwa yang berkaitan dengan praktik jual beli pohon karet dengan pembayaran di tangguhkan yang terjadi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

B. Alasan Memilih Judul

Beberapa alasan yang mendasari dalam pemilihan judul penelitian ini, adalah sebagai berikut:

1. Alasan Objektif; Mengingat persoalan muamalah selalu mengalami perkembangan seiring dengan perkembangan zaman dan kemajuan

⁸ Departemen pendidikan dan kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1997, h. 950 dan 1005.

pengetahuan manusia, terutama dalam masalah transaksi jual beli pohon karet dengan pembayaran di tangguhkan.

2. Alasan Subjektif; Penelitian tentang jual beli pohon karet dengan sistem pembayaran di tangguhkan merupakan permasalahan yang berkaitan dengan program studi di fakultas Syari'ah UIN Raden Intan Lampung yaitu program studi Muamalah, sehingga dapat mendukung proses penelitian yang dilakukan.

C. Latar Belakang Masalah

Hubungan antara manusia atau dalam Islam disebut sebagai hubungan muamalah, merupakan kegiatan yang meliputi berbagai aspek yaitu politik, sosial, dan ekonomi. Dalam bidang ekonomi, aspek muamalah meliputi kegiatan untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup, seperti jual beli, utang piutang, sewa menyewa dan berbagai usaha bersama.

Dalam kegiatan bermu'amalah, manusia telah diberi keleluasan untuk menjalankannya. Akan tetapi, keleluasaan itu bukan berarti semua cara dapat dikerjakan. Untuk menjamin keselarasan dan keharmonisan antara sesama dibutuhkan kaidah-kaidah yang mengaturnya sebagaimana firman Allah SWT, dalam surah an-Nisa' ayat 29 yang berbunyi:

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ
إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya :Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu dan janganlah kamu membunuh dirimu; Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu. (QS. an-Nisa : 29).⁹

Islam menetapkan berbagai aturan kepada pemeluknya untuk mengadakan komunikasi dan interaksi antar sesama. Diantara aturan tersebut adalah transaksi jual beli dengan berbagai bentuk dan macamnya. Jual beli merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena dalam setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini. Untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan terbesar akan terbentuk akad jual beli.¹⁰

Jual beli dalam bahasa Arab “*al-bai*” yang berarti menjual, mengganti dan menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Lafal al-bai’ terkadang digunakan untuk pengertian lawannya, yakni kata asy-syira’ (beli). Dengan

⁹ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, h. 153.

¹⁰ Dimyauddin Djuwaini, *Pengantar Fiqh Muamalah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2008, h. 69.

demikian kata al-bai' berarti jual, tetapi sekaligus juga berarti beli.¹¹ Adapun pengertian jual beli secara istilah menurut Abu Luis Ma'luf mengemukakan jual beli adalah menyerahkan barang (yang telah diberi harga) dan mengambil atau menerima hanya atas barang tersebut atau mengambil barang (yang diberi harga) dan menyerahkan uang atau barang itu, yang demikian itu adalah timbal balik.¹²

Seiring dengan berjalannya waktu dan berkembangnya zaman kearah yang lebih modern, maka transaksi jual beli juga berkembang menjadi beraneka ragam bentuk maupun caranya. Salah satunya seperti jual beli pohon karet dengan sistem Pembayaran ditangguhkan yang terjadi Desa Tunggal warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Pohon karet merupakan salah satu jenis pohon khas dari daerah tropis. Di mana pohon ini sangatlah familiar dan banyak terdapat didaerah-daerah Indonesia, termasuk di Lampung. Sebab, di pulau ini pohon karet banyak ditanam atau di budidayakan oleh masyarakat, baik secara individu ataupun kelompok. Bahkan di kawasan ini, pengelolaannya dilakukan secara serius.

Secara umum usia tebang pohon karet adalah lebih kurang dari sepuluh tahun, namun ada sebagian besar sampai dua belas tahun atau lebih, tergantung dengan kondisi getah yang di hasilkan pohon karet tersebut masih kondusif atau tidak.

¹¹ Mahmud Yunus, *Op. Cit.*,

¹² Abu Luis Ma'luf, *Al-Munjid*, Darul Masyariq, tt, h. 57.

Kayu karet merupakan salah satu jenis kayu tropis yang memiliki nilai komersial yang sangat baik dalam pasar komoditas. Sehingga membudidayakan tanaman karet bisa dikatakan sebagai sebuah investasi yang menjanjikan untuk hari ke depan. Hal tersebut di karenakan getah karet memiliki harga jual tinggi dan banyak orang menjual belikan getahnya karena dapat menguntungkan dan menjadi investasi kurang lebih delapan tahun, pohon karet yang di tebang biasanya hasil getahnya sudah tidak produktif lagi atau faktor usia yang mengakibatkan pohon karet sudah tidak menghasilkan getah dan akan di ganti dengan bibit pohon karet yang baru.

Untuk memenuhi kelangsungan hidup maka banyak pemilik pohon karet di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang menjual pohon karet di tanahnya sendiri karena pohon karet tersebut sudah tidak menghasilkan getah lagi karena faktor usia karet yang sudah tua dan akan di tanam kembali dengan bibit yang baru.

Dengan adanya praktik jual beli tersebut, para pemilik tanah (penjual pohon karet) tidak mempunyai kuasa terhadap tanah miliknya sebelum pohon karet tersebut ditebang oleh pembelinya, sedangkan waktu pembayaran nya di tangguhkan. Dan praktik tersebut sudah berjalan cukup lama kurang lebih sepuluh tahun bahkan boleh disebut sebagai tradisi.

Praktik jual beli yang dilakukan oleh masyarakat Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kaupaten Tulang Bawang masih terdapat

indikasi yang merugikan penjual bila ditinjau dari perspektif hukum Islam, baik dari segi kejelasan akad, kondisi barang yang diperjualbelikan, maupun waktu pelaksanaan pembayaran dan penebangannya.

Berdasarkan permasalahan tersebut, maka dianggap perlu untuk mengadakan penelitian dengan pembahasan yang lebih jelas mengenai bagaimana praktik jual beli pohon karet dengan sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang serta bagaimana praktik jual beli pohon karet tersebut menurut analisis fiqh muamalah. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan suatu penelitian dan pengamatan secara intensif terhadap praktik yang dijalankannya. Dengan tema judul penelitian: “ **Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Jual Beli Pohon Karet dengan Sistem Tangguh (Studi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang)**”.

D. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang di paparkan pada latar belakang masalah di atas , maka yang menjadi pokok masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana praktik jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten tulang Bawang?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang?

E. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Penelitian ini mempunyai tujuan, yaitu sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui praktik jual beli pohon karet dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam tentang praktik jual beli pohon karet dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

2. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini yaitu sebagai berikut :

- a. Secara praktis : dapat bermanfaat bagi masyarakat umum sehingga mampu menumbuhkan keimanan dan ketakwaan kepada Allah SWT, dan juga dapat dijadikan landasan bagi umat Islam dalam acuan pelaksanaan kegiatan ekonomi perdagangan yang sesuai dengan syariat Islam, khususnya pada masyarakat di Desa Tunggal Warga
- b. Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.
- c. Secara teoritis : Dapat memperkaya khazanah pemikiran Ke Islaman pada umumnya di Akademik Fakultas Syari'ah Jurusan Mu'amalah pada khususnya, selain itu diharapkan menjadi stimulus bagi penelitian selanjutnya sehingga proses pengkajian akan terus berlangsung dan akan memperoleh hasil yang maksimal.

F. Metode Penelitian

Demi mencapai pengetahuan yang benar, maka diperlukan metode yang mampu mengantarkan peneliti mendapat data yang valid dan otentik, yaitu :

1. Jenis dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Menurut jenisnya, penelitian dalam skripsi ini termasuk dalam penelitian lapangan (*field research*). Menurut Kartini Kartono, penelitian lapangan (*fieldresearch*) yaitu penelitian lapangan yang dilakukan dalam kancan kehidupan yang sebenarnya.¹³ Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa penelitian lapangan adalah penelitian yang dilakukan dalam kancan kehidupan pada suatu objek. Dan penelitian ini dilakukan pada masyarakat yang melaksanakan praktik jual beli pohon karet dengan Sistem Tngguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang, dan penelitian ini dilakukan dengan melihat hal-hal yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

Selain itu, jenis penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (*Library Research*). Penelitian kepustakaan (*Library Research*) adalah pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kepustakaan (*Library Research*) yaitu mengadakan

¹³ Kartini Kartono, *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Bandung: Mandar Maju, 2004, h. 32.

penelitian dengan cara membaca, menelaah dan mencatat bahan dari berbagai literature yang berhubungan langsung dan yang mempunyai relevansi dengan permasalahan yang akan di kaji dalam penelitian.

b. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analitis. Yang di maksud dengan metode deskriptif adalah “Suatu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif, mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, cirri-ciri serta hubungan antara diantara unsur-unsur yang ada atau fenomena tertentu”.¹⁴ Dalam penelitian ini akan digambarkan praktik jual beli pohon karet dengan Sistem Tangguh yang terjadi di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang sehingga akan diperoleh gambaran umum yang komprehensif tentang praktik jual beli tersebut.

Sedangkan yang dimaksud dengan analitis sendiri, sebagaimana yang dikutip oleh Kaelan M.S dari Patton yaitu : “Suatu proses mengatur urutan data. Mengorganisasikannya ke suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar yang kemudian melakukan pemahaman, penafsiran dan iterprestasi data”.¹⁵ Dengan demikian maka dalam penelitian ini hanya melukiskan, memaparkan dan melaporkan suatu keadaan obyek tanpa menarik kesimpulan umum, kemudian pada akhir pembahasan dilakukan suatu analisis kritis.

¹⁴ *Ibid.*, h. 33.

¹⁵ Kaelan. M.S. *Metode Penelitian Bidang Kualitatif Bidang Filsafat*, Yogyakarta : Paradigina, 2005, h. 58.

2. Jenis dan Sumber Data

Jenis dan sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder, yaitu sebagai berikut :

- a. *Data Primer* adalah data yang diperoleh secara langsung dari hasil penelitian lapangan dalam hal objek yang akan diteliti atau digambarkan sendiri oleh orang yang hadir pada waktu kejadian.¹⁶

Adapun data primer ini diperoleh masyarakat Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

- b. *Data sekunder* adalah kesaksian atau data yang tidak berkaitan langsung dengan sumbernya yang asli. Dengan demikian data sekunder adalah sebagai pelengkap dari data primer. Data sekunder ini penulis peroleh dari ruang perpustakaan dengan membaca, menelaah dan mencatat literatur-literatur atau karya-karya yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti, baik itu berbentuk buku-buku, kitab-kitab, jurnal, kamus, dan sumber lainnya.

3. Populasi

- a. Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek / subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian di tarik kesimpulannya.¹⁷ Menurut Nana Sudjana, populasi

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi III*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, h. 114.

¹⁷ Sugiono, *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta, 2001, h. 57.

adalah “Sumber data yang artinya sifat atau karakteristik dari sekelompok subyek, gejala atau obyek”.¹⁸

Berdasarkan pendapat di atas maka dapat dipahami bahwa populasi adalah semua unit analisa yang akan diteliti sehingga dapat diambil kesimpulan secara umum, atau seluruh obyek yang akan menjadi focus penelitian. Populasi dalam penelitian adalah semua yang memiliki hubungan dengan praktik jual beli pohon karet dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang yaitu 12 orang, dimana 10 orang sebagai pemilik pohon dan 2 orang sebagai pembeli oleh sebab itu karena popoulasinya 12 orang, maka penelitian ini berupa penelitian populasi

4. Metode Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data yang berasal dari sumbernya menggunakan metode kepustakaan (*Library Research*) dan metode lapangan. Metode kepustakaan yaitu pengumpulan data dan informasi dengan bantuan bermacam-macam materi yang terdapat di ruang perpustakaan.¹⁹ Dalam penelitian perpustakaan ini dilakukan dengan cara membaca, menelaah serta mempelajari berbagai bahan bacaan atau literature yang berkaitan dengan permasalahan yang sedang dibahas baik berupa Al-Qur'an, Al-Hadits, buku-buku karangan yang berkaitan.

¹⁸ Nana Sudjana, *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rineka Cipta, 1996, h. 23.

¹⁹ Kartini Kartono, *Op. Cit.*, h. 33.

Kemudian di dalam penelitian lapangan ini digunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu :

a. Lapangan

1) Metode Interview

Interview menurut Mardalis adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan kepada si peneliti.²⁰

Dalam penelitian ini menggunakan interview bebas terpimpin, artinya penginterview memberikan kebebasan kepada orang yang di interview untuk memberi tanggapan atau jawaban sendiri. Metode interview ini akan dipergunakan untuk memperoleh data tentang praktik jual beli pohon karet dengan penebangan di tangguhkan di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

2) Metode Observasi

Metode observasi menurut Cholid Narbuko dan Abu Ahmadi yaitu “Pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala yang tampak pada obyek

²⁰ Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, Jakarta: Bumi Aksara, 2004, h. 64.

penelitian”.²¹ Sedangkan Sutrisno Hadi menjelaskan bahwa : “Sebagai metode ilmiah, observasi bisa diartikan sebagai pengamatan dan pencatatan dengan sistematis tentang fenomena-fenomena yang diselidiki.”²²

Dalam penelitian ini observasi yang digunakan adalah observasi *non partisipan*. Peneliti berlaku sebagai pengamat dan tidak mengambil bagian kehidupan yang di observasi dengan tujuan agar dapat diperoleh keterangan secara objektif. Metode *non partisipan* ini dilaksanakan dengan cara penelitian berada di lokasi penelitian, hanya pada saat kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan masalah yang diteliti.

3) Kepustakaan (*Library research*)

a). Metode Dokumentasi

Metode dokumentasi menurut Koencara Ningrat metode dokumentasi adalah kumpulan data variable yang berbentuk tulisan.²³ Kemudian menurut Suharsimi Arikunto adalah “ Mencari data mengenai hal-hal atau sesuatu yang berkaitan dengan masalah variable yang berupa catatan,

²¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi penelitian*, Jakarta: Bumi Aksara, 1997, h. 54.

²² Sutrisno Hadi, *Metode Research II*, Yogyakarta: Andi Offset, 2006, h. 83.

²³ Koentjaraningrat, *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia, 2004, h. 46.

transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, notulen rapat, buku langger.”²⁴

Dengan demikian maka dapat disimpulkan bahwa, yang dimaksud dengan metode dokumentasi adalah suatu cara di dalam mengumpulkan data-data yang diperlukan dengan melalui catatan tertulis. Metode ini peneliti gunakan untuk mendapat informasi data yang dibutuhkan yang berkaitan dalam penelitian ini, seperti sejarah, jumlah penduduk, sarana dan prasarana.

5. Metode Analisis Data

Analisis data pada penelitian ini dilakukan secara kualitatif, yaitu dari data yang diperoleh kemudian disusun secara sistematis kemudian dianalisis secara kualitatif untuk mencapai kejelasan masalah yang dibahas. Adapun pengertian dari analisis data kualitatif adalah suatu cara penelitian yang menghasilkan data deskriptif analisis, yaitu apa yang dinyatakan oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.²⁵

Setelah analisis data selesai maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, yaitu dengan menuturkan dan menggambarkan apa adanya sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Dari hasil tersebut kemudian ditarik suatu kesimpulan yang merupakan jawaban atas permasalahan

²⁴ Suharsimi Arikunto, *Op. Cit.*, h. 23.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005, h.12.

yang diangkat dalam penelitian ini dengan menggunakan cara berfikir deduktif.

Cara berfikir deduktif yaitu metode analisis data dengan cara bermula dari data yang bersifat umum kemudian dari data yang bersifat umum tersebut ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.²⁶ Metode ini digunakan dalam pengumpulan data dari berbagai literatur yang berkaitan dengan praktik jual beli pohon karet dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang dan kemudian selanjutnya di analisa dan di tarik suatu kesimpulan sehingga menjadi suatu keputusan yang bersifat khusus.



²⁶ Sutrisno Hadi. *Op. Cit.*, h. 28.

BAB II

JUAL BELI DALAM HUKUM ISLAM

A. Konsep Jual Beli dalam Islam

1. Pengertian Jual Beli

Secara etimologi, jual beli *al-mubadalah* (saling tukar menukar/barter).²⁷ merupakan akad yang umum digunakan oleh masyarakat, karena pada dasarnya setiap pemenuhan kebutuhannya, masyarakat tidak bisa berpaling untuk meninggalkan akad ini untuk mendapatkan makanan dan minuman misalnya, terkadang ia tidak mampu untuk memenuhi kebutuhan itu dengan sendirinya, tapi akan membutuhkan dan berhubungan dengan orang lain, sehingga kemungkinan besar akad menggunakan akad jual beli.

Jual beli (الْبَيْعُ) artinya menjual, mengganti dan menukar (sesuatu dengan sesuatu yang lain). Kata الْبَيْعُ dalam bahasa arab terkadang digunakan untuk pengertian lawannya yaitu kata الْتَرَاءُ (beli). Dengan demikian kata الْبَيْعُ berarti jual sekaligus beli.²⁸ Jual beli adalah pertukaran sesuatu dengan sesuatu (yang lain) dari *ba'i* (jual beli)

²⁷ Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, Jakarta: Raja Grafindo Perkasa, 2015, h. 167.

²⁸ Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi Islam* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), h. 113.

adalah *al-tijarah* yang berarti perdagangan.²⁹ Jual beli adalah istilah yang sering di gunakan untuk menyebut dua sisi yaitu menjual dan membeli.

Menurut Ulama Hanafiyah

مُبَا دَلُهُ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى وَجْهِ مَخْصُوصٍ

Jual beli adalah pertukaran harta benda dengan harta (yang lain) berdasarkan cara khusus yang di perbolehkan.³⁰

Menurut Imam Nawawi

مُعَا بَلُهُ مَا لٍ بِمَالٍ تَمْلِيْكًَا

Jual beli adalah pertukaran harta dengan harta (yang lain) untuk kepemilikan³¹

Menurut Ibnu Qodamah

مُبَا دَلُهُ أَمْوَالٍ تَمْلِيْكًَا وَ تَمَلْكًا

Jual beli adalah pertukaran benda dengan benda lain dengan jalan saling merelakan atau memindahkan hak milik dengan ada penggantinya dengan cara yang di perbolehkan.³²

Beberapa pengertian di atas dapat di pahami bahwa jual beli secara terminologi atau istilah adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang, harta dengan harta dengan

²⁹ A Kumaidi Ja'far, *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Bandar Lampung: Permatet Publishing, 2016), h. 102.

³⁰ *Ibid.*, h.103.

³¹ *Ibid.*,

³² *Ibid.*,

jalan melepaskan atau merelakan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerimanya dengan sesuai perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan *syara'* dan di sepakati kedua belah pihak.

Dibenarkan *syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang di perjual belikan. Benda yang diperjual belikan harus dapat di serah terimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.³³

2. Dasar Hukum Jual Beli Dalam Islam

Jual beli merupakan bagian dari mu'amalah mempunyai dasar hukum yang jelas, baik dari Al-Qur'an, Al-Sunnah dan telah menjadi Ijma' ulama dan kaum muslim. Bahkan jual beli bukan hanya sekedar mua'amalah, akan tetapi menjadi salah satu media untuk melakukan kegiatan untuk saling tolong menolong sesama manusia.³⁴ Adapun yang menjadi dasar dari jual beli menurut Hukum Islam adalah sebagai berikut:

³³ *Ibid.*, h. 104.

³⁴ Imam Mustofa. *Fiqih Muamalah kontemporer*, Jakarta: Raja Grafindo, 2016, h. 22.

a. Dalam Al-Qur'an

Al-Qur'an menggariskan bahwa sebuah transaksi hanya sah apabila setiap pihak yang terlibat dalam transaksi memenuhi kewajiban yang berkaitan dengan konsekuensi sebuah transaksi.³⁵

Dasar jual beli di dalam Al-Qur'an Qs. Al-Baqarah ayat 275



Artinya: “Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.”³⁶

³⁵ Juhaya S. Praja, *Ekonomi Syariah*, Bandung: Pustaka Setia, 2012, h. 96.

³⁶ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 86.

Qs. Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya..”³⁷

Qs. An-nisa ayat 29:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.”³⁸

b. Dasar Hukum dalam As-Sunnah

Dasar Hukum yang berasal dari Al-Sunnah antara lain adalah sebagai berikut:

- 1) Hadis Rasulullah Saw. yang di riwayatkan Rifa’ah bin Rafi’ al-Bazar dan Hakim

³⁷ *Ibid.*, h. 88.

³⁸ *Ibid.*, h. 153.

سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - أَيْ الْكَسْبِ أَوْ طَيْبٍ أَوْ أَفْضَلٍ قَالَ :

" عَمَلُ الرَّجُلِ بِيَدِهِ وَ كُلُّ بَيْعٍ مَبْرُورٍ " ³⁹.

Artinya: "Rasullah Saw. bersabda ketika ditanya salah seorang sahabat mengenai pekerjaan yang paling baik: Rasullah ketika itu menjawab: pekerjaan yang dilakukan dengan tangan seseorang sendiri dan setiap jual beli yang diberkati(jual beli yang jujur tanpa diiringi kecurangan."

Rasullah Saw. Bersabda:

قال رسول الله عليه وسلم : إنما البيع عن تراض. ⁴⁰

Artinya: "Rasullah Saw. Bersabda: Sesungguhnya jual beli itu harus dengan dasar saling merelakan"

c. Dasar hukum dalam ijma'

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUUNG

Ulama' muslim sepakat (ijma') atas kebolehan akad jual beli. Ijma' ini memberikan hikmah bahwa kebutuhan manusia berhubungan dengan sesuatu yang ada dalam kepemilikan orang lain. Dan kepemilikan sesuatu itu tidak akan diberikan begitu saja, namun terdapat kompensasi yang harus diberikan. Dengan di syari'atkannya jual beli merupakan salah satu cara untuk merealisasikan keinginan dan kebutuhan manusia, karena pada dasarnya manusia tidak bisa hidup tanpa hubungan dan bantuan orang lain.

³⁹ Badruddin al-Aini al-Hanafi, 'umdatul Qari Syarhu sahih al-Bukhari,(Digital library, al-Maktabah al-Syamillah al-isdar al-Sani, 2005), h. 289.

⁴⁰ Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, Sunan Ibnu Majah,(Digital Library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005), h. 737.

Demikian pula yang didefinisikan dalam buku fiqh muamalah karangan Rahmad Syafi'i yang menyebutkan bahwa Ulama telah sepakat bahwa jual beli di perbolehkan dengan alasan bahwa manusia tidak akan mampu mencukupi kebutuhan dirinya, tanpa bantuan orang lain. Namun demikian bantuan atau barang milik orang lain yang dibutuhkannya itu harus diganti dengan barang yang lain yang sesuai.⁴¹

3. Rukun dan Syarat Jual Beli

Setiap perjanjian jual beli harus ada beberapa hal agar akadnya sah dan mengikat. Beberapa hal tersebut disebut sebagai rukun. Akad adalah ikatan antara dua pihak yaitu penjual dan pembeli, jual beli belum dikatakan sah apabila belum ada ijab dan qabul antara kedua belah pihak yaitu penjual dan pembeli. Ijab qabul pada dasarnya dilakukan secara lisan, tapi apabila tidak memungkinkan bisa dengan isyarat asalkan kedua belah pihak memahaminya.

a. Penjual (*ba'i*)

Penjual adalah pemilik harta atau barang yang hendak menjual barangnya kepada pihak lain, penjual haruslah cakap bertindak hukum (*mukallaf*) dalam melakukan transaksi.

b. Pembeli (*mustari*)

Pembeli adalah orang yang cakap dalam bertindak, dapat menggunakan dan membelanjakan hartanya serta tidak mubazir

⁴¹ Rahmad syafe'i, *fiqh muamalah*. Bandung. CV. Pustaka Setia, 2006. h. 75.

dan tidak bertentangan dengan syari'at islam, juga meliputi cakap untuk bertindak hukum (*mukallaf*).

Penjual dan pembeli dalam perjanjian jual beli harus memenuhi persyaratan antara lain:

1) Berakal

Jual beli tidak dipandang sah apabila dilakukan oleh orang gila dan anak kecil yang tidak berakal. Dalam persoalan ini terjadi perbedaan pendapat antara ulama kalangan hanafiyah, malikiyah dan hanabilah berpendapat transaksi jual beli di lakukan oleh anak kecil yang telah *mumayiz* adalah sah. *Mumayiz* dimaksudkan mengerti dengan jual beli yang di lakukanya. Ulama Syafi'iyah berpendapat jual beli yang dilakukan oleh anak kecil tidaklah sah karena ada ahliyah (kepantasan) dalam hal ini Ulama Syafi'iyah memandang *aqid* (pihak yang berakad) disyaratkan cerdas, maksudnya telah baligh dan mempunyai ahliyah dalam persoalan agama dan harta.⁴²

Kedua belah pihak dapat membedakan mana yang baik dan mana yang buruk bagi dirinya agar kedua belah pihak tidak terkecoh, jual beli yang salah satu pihak tidak berakal maka jual beli ini tidak sah.⁴³ Sesuai dengan firman Allah dalam Qs. An-nisa ayat 5:

⁴² Rozalinda, *Fiqh Ekonomi Syari'ah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016, h. 66.

⁴³ Sulaiman Rasyid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2008, h. 227.

وَلَا تُؤْتُوا السُّفَهَاءَ أَمْوَالَكُمُ الَّتِي جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ قِيَمًا

وَأَرْزُقُوهُمْ فِيهَا وَاكْسُوهُمْ وَقُولُوا لَهُمْ قَوْلًا مَعْرُوفًا ﴿٤٤﴾

Artinya: “Dan janganlah kamu serahkan kepada orang-orang yang belum sempurna akalnya, harta (mereka yang ada dalam kekuasaanmu) yang dijadikan Allah sebagai pokok kehidupan. Berilah mereka belanja dan pakaian (dari hasil harta itu) dan ucapkanlah kepada mereka kata-kata yang baik.”⁴⁴

2) Atas Kehendak Sendiri

Jual beli haruslah dilakukann atas kehendak sendiri secara sukarela dan bukan merupakan tekanan atau paksaan dari pihak lain, jual beli dengan paksaan tidaklah sah dan diperbolehkan.

3) Keduanya tidak mubazir

Kedua belah pihak dalam jual beli bukanlah termasuk orang-orang yang boros (mubazir), sebab orang yang boros menurut hukum islam dikatakan sebagai orang yang tidak cakap dalam bertindak, artinya dia tidak dapat melakukan sendiri perbuatan hukum meskipun hukum tersebut menyangkut kepentingan semata.

4) Baligh

Menurut Hukum Islam (fiqh) dikatakan baligh atau dewasa apabila telah berusia 15 tahun bagi anak laki-laki dan telah datang bulan atau haid bagi anak perempuan, oleh karena itu transaksi jual beli yang dilakukan anak kecil tidaklah sah. Namun, bagi anak-anak yang sudah dapat membedakan mana yang baik dan mana yang

⁴⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 142.

buruk tetapi dia belum dewasa (belum mencapai 15 tahun dan belum haid atau belum bemimpi) menurut sebagian ulama bahwa anak tersebut diperbolehkan melakukan jual beli, khususnya untuk barang-barang kecil dan tidak bernilai tinggi seperti yang biasa terjadi di tengah masyarakat itu sendiri, dan kita tau bahwa Hukum Islam tidak membuat suatu peraturan yang menimbulkan kesulitan atau kesukaran bagi pemeluknya.⁴⁵

c. Barang Jualan (*ma'kud 'alaih*)

Barang jualan adalah sesuatu yang menjadi objek jual beli dan objek tersebut harus di perbolehkan menurut Agama Islam, bisa di serahkan kepada pembeli dan bisa diketahui meskipun hanya dengan ciri-cirinya. Syarat objek akad adalah:⁴⁶

- 1) Suci dan dapat disucikan sehingga tidak sah penjualan benda-benda najis seperti anjing, babi dan yang lainnya
- 2) Memberi manfaat menurut *syara'*, maka dilarang jual beli barang yang tidak boleh jual beli barang yang tidak boleh diambil manfaatnya seperti menjual babi, cicak dan lainnya
- 3) Jangan ditaklikkan yaitu dikaitkan atau digantungkan kepada hal-hal seperti jika saudara ku menitipkan sesuatu berupa barang dan dia lupa mengambilnya maka akan aku jual barang tersebut

⁴⁵ A Khumaidi Jafar, *Op. Cit.*, h. 105.

⁴⁶ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2014, h. 73.

4) Tidak ada balasan waktunya, jual beli dengan pembatasan, waktu tidak sah sebab jual beli merupakan salah satu sebab kepemilikan secara penuh yang dibatasi apapun kecuali oleh ketentuan *syara'*

5) Dapat diserahkan terimakan baik cepat maupun lambat, tidaklah sah menjual barang yang sudah lari dan tidak bisa di tangkap lagi, barang-barang yang sudah hilang atau barang yang sulit diperoleh kembali karena samar seperti seekor ikan yang jatuh ke kolam, tidak diketahui dengan pasti ikan tersebut sebab dalam kolam tersebut terdapat ikan-ikan yang sama

6) Barang yang diperjual belikan merupakan milik sendiri, tidaklah sah menjual barang orang lain tanpa seizing pemiliknya atau barang-barang yang baru akan menjadi pemiliknya

7) Diketahui (dilihat), barang yang diperjual belikan harus dapat diketahui banyaknya, beratnya, takarannya, atau ukuran-ukuran yang lainnya, maka tidaklah sah jual beli yang menimbulkan keraguan dari salah satu pihak.

d. *Sighat* (ijab qabul)

Ijab adalah perkataan penjual misalnya saya jual barang ini dengan harga sekian, sedangkan qabul adalah ucapan dari pembeli yang

menyatakan misalnya saya terima (saya beli) barang tersebut dengan harga sekian.⁴⁷

Ijab qabul yaitu persetujuan antara pihak penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli dimana pihak pembeli menyerahkan uang kepada penjual, dan penjual menyerahkan barang kepada pembeli.

Syarat ijab qabul:⁴⁸

- 1) Ijab dan qabul harus dilakukan oleh orang yang cakap bertindak hukum. Kedua belah pihak harus berakal, *muwayyis*, tau akan hak dan kewajiban. Syarat ini pada hakikatnya merupakan syarat pihak yang berakad bukan syarat sighat akad. Berkaitan dengan ini maka media transaksi berupa tulisan atau isyarat juga harus berasal dari pihak yang mempunyai kriteria dan memenuhi syarat tersebut
- 2) Kesesuaian antara qabul dengan ijab, baik dari sisi kualitas maupun kuantitas, tidak ada yang memisahkan antara penjual dan pembeli. Apabila pihak pembeli menjawab lebih dari ijab yang diungkapkan penjual, maka transaksi tetap sah. Sebaliknya, apabila pembeli menjawab lebih singkat dari ijab yang diucapkan penjual, maka transaksi tidak sah. Kesesuaian ini termasuk dalam harga dan system pembayara. Maksudnya janganlah pembeli diam saja setelah penjual menyatakan

⁴⁷ Lukman Hakim, *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*, Jakarta: Erlangga, 2012, h. 112.

⁴⁸ Imam Mustofa, *Op. Cit.*, h. 27.

ijabnya, jangan pula diselangi oleh kata-kata lain antara ijab dan qabul

- 3) Ijab qabul dilakukan dalam satu majelis, sekiranya para pihak yang melakukan transaksi hadir dalam satu tempat berbeda, namun keduanya dianggap saling mengetahui. Artinya, perbedaan tempat bisa dianggap satu majelis atau satu lokasi dan waktu karena berbagai alasan, menurut ulama Malikiyah, diperbolehkan transaksi (ijab dan qabul) dilakukan dalam satu tempat, ulama Syafi'iyah dan Hanbaliyah mengemukakan bahwa jarak antara ijab dan qabul tidak boleh terlalu lama, adapun transaksi yang dilakukan dengan media surat juha sah meskipun pihak-pihak yang bertransaksi tidak berada dalam satu lokasi karena ungkapan yang ada dalam surat hakikatnya adalah mewakili para pihak.

e. Syarat nilai tukar (harga barang)

Nilai tukar barang adalah termasuk unsur yang terpenting. Zaman sekarang nilai tukar barang diukur dengan nominal rupiah. Berkaitan dengan nilai ini, ulama fiqh membedakan antara *as-tsamn* adalah harga pasar yang berlaku di tengah-tengah masyarakat, sedangkan *as-si'r* adalah modal barang yang seharusnya diterima pedagang sebelum dijual kepada konsumen.

Dengan demikian ada dua harga yaitu harga sesama pedagang dan harga antara pedagang dan konsumen (harga jual pasar).⁴⁹

4. Macam-macam Jual Beli

Mazhab Hanafi membagi jual beli dari segi sah atau ti daknya menjadi tiga bentuk,⁵⁰ antara lain:

a. Jual beli yang shahih

Apabila jual beli itu disyari'atkan, memenuhi rukun atau syarat yang ditentukan, barang yang diperjual belikan bukan milik orang lain, dan tidak terikat dengan *khiyar* lagi, maka jual beli itu shahih dan mengikat kedua belah pihak. Contohnya, seseorang membeli suatu barang seluruh rukun dan syaratnya telah terpenuhi, barang tersebut juga telah diperiksa oleh pembeli dan tidak ada cacat dan tidak ada yang rusak, uang dan barang sudah diserahkan dan tidak ada *khiyar* lagi.

b. Jual beli yang batil

Apabila jual beli tersebut salah satu rukunnya tidak terpenuhi, atau jual beli itu pada dasarnya dan sifatnya tidak disyari'atkan, maka jual beli itu batil. Contohnya jual beli yang dilakukan oleh orang gila, anak-anak, atau barang yang diperjual belikan termasuk barang yang di haramkan dalam islam.

⁴⁹ M. Ali Hasan, *Berbagai Transaksi dalam Islam* (Jakarta: Erlangga, 2003), h.12.

⁵⁰ *Ibid.*, h. 134.

c. Jual beli yang *fasid*

Ulama Mazhab Hanafi membedakan jual beli *fasid* dan jual beli batil. Sedangkan jumhur ulama tidak membedakan antara jual beli *fasid* dan jual beli batil.

Adapun jual beli yang dilarang dalam Islam antara lain:

1) Jual beli barang yang belum diterima

Seorang muslim tidak boleh membeli suatu barang kemudian menjualnya, padahal ia belum menerima barang tersebut.

2) Jual beli seorang muslim dengan muslim lainnya

Seorang muslim tidak boleh jika saudara seagamanya telah membeli suatu barang seharga dua ribu rupiah misalnya, kemudian ia berkata kepada penjualnya mintalah kembali barang itu dan batalkan jual belinya dan aku akan membelinya darimu seharga tiga ribu.

3) Jual beli *najasy*

Seorang muslim tidak boleh menawar suatu barang dengan harga tertentu padahal ia tidak ingin membelinya, namun ia berbuat seperti itu agar diikuti penawaran lainnya kemudian pembeli tertarik membeli barang tersebut. Seorang muslim tidak boleh berkata kepada pembeli yang ingin membeli suatu barang “barang ini di beli dengan harga sekian” ia berkata bohong untuk menipu pembeli tersebut dan bersekongkol dengan pihak penjual.

4) Jual beli barang-barang haram dan najis

Tidak boleh menjual benda-benda seperti alkohol, babi, dan barang terlarang lainnya, haram di perjual belikan sehingga jual beli tersebut dipandang batal dan jika dijadikan harga penukar, maka jual beli tersebut di anggap *fasid*.⁵¹

5) Jual beli *gharar*

Gharar dapat diartikan sebagai ketidak pastian/ketidakjelasan. Unsur ini juga dilarang dalam islam.⁵² Akad muamalah dilarang memperjanjikan hal-hal yang keberadaanya tidak pasti. Artinya, akad muamalah dilarang memperjanjikan sesuatu yang bersifat *gharar* dengan ancaman kebatalan demi hukum atas akad tersebut. *Gharar* merupakan larangan utama kedua dalam transaksi muamalah setelah *riba*.⁵³ Menurut Ibn Al-Maliki *gharar* yang dilarang ada sepuluh macam yaitu:

- a) Tidak dapat diserahkan, seperti menjual anak hewan yang masih di dalam perut induknya
- b) Tidak diketahuinya harga dan barang
- c) Tidak diketahui sifat barang atau harga
- d) Tidak diketahui ukuran barang dan harga
- e) Tidak diketahui massa yang akan datang seperti saya jual barang ini setelah si A datang

⁵¹ Hendi suhendi, *Op. Cit.*, h. 69.

⁵² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana 2012, h. 31.

⁵³ Sutan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah*, Jakarta: Kencana, 2014, h. 168.

- f) Menghargakan dua kali pada satu harga
- g) Menjual barang yang diharapkan selamat
- h) Jual beli *husha'* misalnya pembeli memegang tongkat, jika tongkat tersebut jatuh maka wajib membeli
- i) Jual beli *munadzabah*, yaitu jual beli dengan cara lempar melempar, seperti seorang melempar kan barang nya maka terjadilah jual beli
- j) Jual beli *muamassah*, yaitu apabila memegang atau mengusap kain ia wajib untuk membelinya⁵⁴
- 6) Jual beli sperma (mani) hewan, seperti mengawinkan seekor sapi jantan dengan sapi betina agar dapat memperoleh keturunan, jual beli seperti ini haram hukumnya.
- 7) Jual beli anak binatang yang masih berada di dalam perut induknya. Jual beli seperti ini di larang karena barangnya belum ada dan tidak nampak.
- 8) Jual beli dengan *muhaqallah*
- Baqalah* berarti tanah, sawah, dan kebun, maksud *muhaqallah* disini adalah menjual tanam-tanaman yang masih diladang atau di sawah. Hal ini di larang Agama sebab ada prasangka riba.
- 9) Jual beli dengan *muzabanah*
- Menjual buah yang basah dengan buah yang kering, seperti menjual padi kering dengan bayaran padi basah, sedangkan

⁵⁴ Rachmad Syafei, *Op. Cit.*, h. 98.

ukurannya dengan dikilo sehingga akan merugikan pemilik padi kering.

10) Menentukan dua harga untuk satu barang yang diperjual belikan. Menurut Syafi'i penjualan seperti itu mengandung dua arti, yang pertama seperti seorang berkata "kujual baju ini seharga 5,- dengan tunai atau 10,- dengan cara utang". Arti kedua ialah seorang berkata "aku jual baju ini kepadamu dengan syarat kamu harus menjual tasmu padaku.

11) Jual beli dengan syarat (*iwadh mahjul*)

Jual beli seperti ini hampir sama dengan jual beli dengan menentukan dua harga, hanya saja di sini dianggap sebagai syarat, seperti seorang berkata "aku jual mobilku yang butut ini kepadamu dengan syarat kamu mau menjual rumahmu kepadaku".

12) Jual beli dengan mengecualikan sebagai benda yang dijual

Seperti seorang menjual salah satu bagiannya. Misalnya A menjual seluruh barangnya yang ada dirumahnya, kecuali lemari es nya. Jual beli ini sah, yang tidak sah apabila yang di kecualikannya adalah yang tidak jelas.

13) Larangan menjual makanan hingga dua kali ditakar

Hal ini menunjukkan kurangnya saling percaya antara penjual dan pembeli.

14) Menemui orang di desa sebelum mereka masuk kepasar untuk membeli benda-bendanya dengan harga yang semurah-murahnya, sebelum mereka tahu harga pasaran, kemudian ia menjual dengan harga setinggi-tingginya.

15) Menawar barang yang sedang di tawar orang lain, seperti seorang berkata “Tolaklah harga tawaran itu, nanti aku yang membelinya dengan harga yang lebih mahal”. Hal ini dilarang karena akan menyakitkan orang lain.

Rasullah Saw. Bersabda:

لَا يَسُوْمُ الرَّجُلُ عَلَى سَوْمِ أَخِيهِ (رواه مسلم)

Artinya: Tidak boleh seseorang menawar atas tawaran saudaranya (HR. Muslim)

B. Jual beli dengan sistem tangguh (*Ba'i Bidhaman 'Ajil*)

1. Pengertian *Ba'i Bidhamanil 'Ajil*

Ba'i Bidhaman 'Ajil dikenal dengan jual beli tertangguh, yaitu menjual sesuatu dengan di segerakan penyerahan barang-barang yang dijual kepada pembeli dan di tangguhkan pembayarannya.⁵⁵ *Bai' bidhamanil ajil* sah jika waktu pembayarannya ditentukan dengan secara pasti, seperti dengan menyebut periode waktu secara spesifik. Jika waktu pembayarannya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli ini batal adanya. Dari segi bentuknya, jual beli ini berbeda dengan *ba'i al-salam*, yang mana pembayaran dilakukan secara tunai,

⁵⁵ Mardani, *Op. Cit.*, h. 183.

sedangkan pengantaran barang di tangguhkan. Menurut kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah, unsur-unsur jual beli ada tiga, yaitu:

a. Pihak-pihak

Pihak-pihak yang terkait dalam perjanjian jual beli terdiri dari penjual , pembeli, dan pihak lain yang terlibat dalam perjanjian tersebut.

b. Objek

Objek jual beli terdiri atas benda yang berwujud dan benda yang tidak berwujud, yang bergerak maupun benda yang tidak bergerak, dan yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar. Syarat objek yang diperjual belikan adalah sebagai berikut: barang yang diperjual belikan harus ada, barang yang diperjual belikan harus dapat diserahkan, barang yang diperjual belikan harus berupa barang yang memiliki nilai/harga tertentu, barang yang diperjual belikan harus halal, barang yang diperjual belikan harus di ketahui oleh pembeli, kekhususan barang yang diperjual belikan harus diketahui, penunjukan dianggap memenuhi syarat langsung oleh pembeli tidak memerlukan penjelasan lebih lanjut, dan barang yang di jual harus ditentukan secara pasti waktu akad.

c. Kesepakatan. Kesepakatan dapat dilakukan dengan tulisan, lisan dan isyarat. Ketiganya mempunyai makna hukum yang sama.⁵⁶

2. Dasar hukum *Ba'i Bidhamanil 'Ajil*

⁵⁶ *Ibid.*, h. 102.

a. Al-Qur'an

1) Firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁵⁷

2) Surah al-baqarah ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

Artinya:”Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁵⁸

3) Surat Al-Baqarah ayat 282

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ
مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

⁵⁷ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 153.

⁵⁸ Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antra Halal dan Haram*, Surabaya: Putra Pelajar, 2002, h. 214.

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu’amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya.”⁵⁹

b. Landasan hukum yang diambil dari Al-Hadis

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اشْتَرَى طَعَامًا مِنْ

يَحْيَى بْنِ أَبِي حَبْشَةَ رَحِمَهُ اللَّهُ عَنْ أَبِي حَبْشَةَ (رواه البخاري)⁶⁰

“ Dari Aisyah r.a bahwa Rasulullah membeli makanan kepada Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi (H.R Bukhari)

c. Kaidah fiqh

أَلَا صَلَّ فِي الْمَعَامَلَاتِ إِلَّا بِأَحَدٍ مِنْهُمَا

Artinya: “ Pada dasarnya, semua bentuk muamalah boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya”.⁶¹

d. Ijma’

Ijma’ berasal dari bahasa arab yang artinya *ajma’a* yang memiliki dua pengertian , yaitu menentukan dan menyetujui sesuatu. *Ijma’* merupakan sumber hukum islam yang ketiga setelah Al-Qur’an dan as-Sunnah/al-Hadits. *Ijma’* tidak lain adalah ijtihad atau interpretasi dari berbagai ahli hukum Islam yang diterima

⁵⁹ Departemen Agama, *Op. Cit.*, h. 86.

⁶⁰ Yusuf Qaradhawi, *Halal dan Haram*, Jakarta: Rabbani Press, 2009, h. 311.

⁶¹ Mardani, *Op. Cit.*, h. 144.

secara universal. Dengan demikian, ijma' adalah kesepakatan universal dari para ahli.⁶²

Dalam praktik jual beli ini Ibnu Qodamah berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh di perbolehkan sebagaimana keumuman jual beli sebagaimana yang di jelaskan dalam surah al-baqarah (2): 275.⁶³ Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan. Sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui kontrak tersebut.

3. Pendapat ulama tentang *bai' bidhamanil ajil*

Ibnu Qodamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara tangguh tidak diharamkan. Jual beli tertangguh merupakan salah satu jual beli yang diisyaratkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara tangguh adalah boleh. Sesuai yang dijelaskan dalam QS. Al-Baqarah (2) ayat 275:

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya: “Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba.”⁶⁴

⁶² Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, h. 14.

⁶³ *Ibid.*, h. 184.

⁶⁴ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 86.

Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000,-, dan Rp 250.000,- secara tangguh. Kontrak jual ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga tidak jelas akan merusak akad jual beli.

Namun ijma ulama berpandangan bahwa jual beli secara tertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surah al-baqarah (2):275.

Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang diisyaratkan. Sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui penangguhan pembayaran tersebut.

4. Prinsip-prinsip jual beli *bidhamanil ajil*

Pada dasarnya prinsip jual beli *bidhamanil ajil* tidak jauh dengan prinsip jual beli secara umum, karena transaksi ini merupakan pengembangan dari kontrak jual beli.

Berikut beberapa prinsip jual beli *bidhamanil ajil*:

a. Kebebasan (al-Hurriyah)

Pihak-pihak yang melakukan kontrak mempunyai kebebasan untuk melakukan suatu perjanjian, baik tentang objek perjanjian maupun syarat-syaratnya, termasuk menetapkan cara-cara penyelesaian sengketa apabila terjadinya di kemudian hari. Kebebasan

menentukan syarat-syarat ini dibenarkan selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh hukum Islam.

Tujuan dari asas ini adalah untuk menjaga agar tidak terjadi saling menzalimi antara sesama manusia melalui kontrak yang dibuatnya.

b. Persamaan dan Kesetaraan (al-Musawah)

Asas ini memberikan landasan bahwa kedua belah pihak yang melakukan kontrak mempunyai kedudukan yang sama atau setara antara satu dengan yang lain. Asas ini penting untuk dilaksanakan oleh para pihak yang melakukan kontrak terhadap suatu perjanjian karena sangat erat hubungannya dengan penentuan hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh kedua belah pihak untuk pemenuhan prestasi dalam kontrak yang dibuatnya.

Asas ini menunjukkan bahwa diantara sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan kekurangan. Untuk itu, antara manusia yang satu dan yang lain hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari kelebihan yang dimilikinya.

c. Keadilan (al-'Adalah)

Pelaksanaan asas ini dalam kontrak dituntut untuk berlaku benar dalam mengungkapkan kehendak dan keadaan, memenuhi perjanjian yang telah disepakati bersama dan memenuhi segala hak dan kewajiban, tidak saling menzalimi dan dilakukannya secara berimbang tanpa merugikan pihak lain yang terlibat dalam kontrak itu.

Syari'ah Islam sangat menekankan arti pentingnya keadilan dalam tindakan bermuamalah sesama manusia, tidak boleh curang, melakukan perbuatan keji, dan selalu bersikap seimbang dalam melakukan perbuatan muamalah dan kontrak terhadap sesuatu hal yang dilakukannya.

Firman Allah dalam Al-Qur'an surat *Hud* ayat 84:



Artinya: “dan kepada (penduduk) Mad-yan (kami utus) saudara mereka, Syu'aib. Ia berkata: "Hai kaumku, sembahlah Allah, sekali-kali tiada Tuhan bagimu selain Dia. dan janganlah kamu kurangi takaran dan timbangan, Sesungguhnya aku melihat kamu dalam Keadaan yang baik (mampu) dan Sesungguhnya aku khawatir terhadapmu akan azab hari yang membinasakan (kiamat).”⁶⁵

Firman Allah dalam surat *al-Ar'af* ayat 89:

رَبَّنَا أَفْتَحْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ وَأَنْتَ خَيْرُ الْفَاتِحِينَ

Artinya:”Ya Tuhan Kami, berilah keputusan antara Kami dan kaum Kami dengan hak (adil) dan Engkaulah pemberi keputusan yang sebaik-baiknya.”⁶⁶

⁶⁵ *Ibid.*, h. 438.

⁶⁶ *Ibid.*, h. 308.

Oleh karena itu, setiap kontrak yang dilakukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan, maka prinsip keadilan sangat menentukan berlangsungnya kontrak tersebut, sebab keadilan itu merupakan hal yang bersifat multidimensional yang berintikan kebenaran.⁶⁷

d. Kerelaan (al-Ridho)

Dalam QS. *An-Nisaa'* (4): 29, dinyatakan bahwa segala transaksi yang dilakukan harus atas dasar suka sama suka atau kerelaan antara masing-masing pihak, tidak boleh ada tekanan, paksaan, penipuan. Jika hal ini tidak terpenuhi, maka transaksi tersebut dilakukan dengan cara batil. Berikut isi dari QS. *An-Nisaa'* (4):29.



يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ
بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِّنْكُمْ وَلَا
تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ

Artinya:”Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang Berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu.”⁶⁸

⁶⁷ Abdul Manan, *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2012, h. 75

⁶⁸ Departemen Agama RI, *Op. Cit.*, h. 153.

Ayat diatas menunjukan, bahwa dalam melakukan suatu perdagangan hendaklah atas dasar suka sama suka atau sukarela. Tidakkah dibenarkan bahwa suatu perbuatan muamalah, perdagangan misalnya, dilakukan dengan pemaksaan ataupun penipuan. Jika hal ini terjadi, dapat membatalkan perbuatan tersebut. Unsur sukarela ini menunjukan keikhlasan dan iktikad baik dari para pihak.

e. Kejujuran dan Kebenaran (ash-Shidiq)

Kejujuran merupakan hal yang harus dilakukan oleh manusia dalam segala bidang kehidupan, termasuk dalam pelaksanaan muamalah. Jika kejujuran ini tidak diterapkan dalam perikatan, maka akan merusak legalitas perikatan itu sendiri. Selain itu, jika terdapat ketidakjujuran dalam perikatan, akan menimbulkan perselisihan diantara pihak. Firman Allah dalam QS. *Al Azhab* (33): 70.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan Katakanlah Perkataan yang benar.”⁶⁹

Perbuatan muamalah dapat dikatakan benar apabila memiliki manfaat bagi para pihak yang melakukan perikatan dan juga bagi

⁶⁹ *Ibid.*, h. 845.

masyarakat dan lingkungannya. Adapun perbuatan muamalat yang mendatangkan mudarat adalah dilarang.

f. Tertulis (al-Kitabah)

Dalam QS. Al-Baqarah (2): 282-283, disebutkan bahwa Allah SWT menganjurkan kepada manusia hendaknya suatu perikatan dilakukan secara tertulis, dihadiri oleh saksi-saksi, dan diberikan tanggung jawab individu yang melakukan perikatan, dan yang menjadi saksi. Selain itu, dianjurkan pula bahwa apabila suatu perikatan dilaksanakan tidak secara tunai, maka dapat dipegang suatu benda sebagai jaminannya. Adanya tulisan, saksi, dan/benda jaminan ini menjadi alat bukti atas terjadinya perikatan tersebut.⁷⁰

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
RADEN INTAN
LAMPUNG

⁷⁰ Mardani, *Op. Cit.*, h. 97.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI POHON KARET DI DESA TUNGGAL WARGA A


A. Gambaran Umum Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

1. Sejarah Desa

Awal mula terbentuknya Desa Tunggal Warga yaitu bermula pada 80 tahun yang lalu tepatnya tahun 1980 Desa Dwi Warga Tunggal Jaya yang berada dalam wilayah Kecamatan perwakilan Banjar Agung dengan Kecamatan induk Menggala di pecah menjadi dua Desa yaitu: dengan Desa induk dengan nama tetap Dwi Warga Tunggal Jaya dengan jumlah penduduk sebanyak 250 KK, dan Desa pemecahan dengan nama Desa Tunggal Warga dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 250 KK. Pada tahun 1998 Desa Tunggal Warga merupakan Desa Persiapan di wilayah Kecamatan Perwakilan Banjar Agung dengan salah satu calon kepala desa adalah pejabat sementara yang menjabat waktu itu yaitu Bapak Ristian pejabat sementara waktu itu.

Pada tahun 1996 Desa Tunggal Warga menjadi Desa definitif dan untuk pertama kalinya mengadakan pemilihan Kepala Desa secara langsung yang akhirnya bapak Satiyo terpilih menjadi Kepala Desa yang diikuti oleh 2 calon kepala Desa, dan selanjutnya diadakan pemekaran RK sehingga menjadi 6 RK. Sehingga untuk periode kepemimpinan kepala kampung bapak Satiyo tahun 1996 s.d 2002 dengan struktur Organisasi sebagai berikut:

- a. Kepala Desa : Satiyo'
- b. Sekretaris Desa : Dimyati
- c. Ketua RK I : Hadi Sumarso
- d. Ketua RK II : Bahrin
- e. Ketua RK III : Ratno
- f. Ketua RK IV : Katimun
- g. Ketua RK V : Nyoman Tawan
- h. Ketua RK VI : Basir



Seiring dengan terbentuknya Kabupaten Tulang Bawang dengan UU Nomor 02 tahun 1997 tentang pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Tulang Bawang dan Daerah Tingkat II Tanggamus, Kecamatan pembantu Banjar Agung menjadi Kecamatan definitif Banjar Agung dengan membawahi wilayah sebanyak 17 desa termasuk didalamnya Desa Tunggal Warga.

Dengan surat keputusan Bupati Tulang Bawang nomor 06 tahun 2000 tentang penyebutan Desa, Kepala Desa, dan Badan Perwakilan Desa (BPD) dan perangkat Desa dalam Kabupaten Tulang Bawang, maka Desa Tunggal Warga dirubah menjadi Kampung Tunggal Warga. Dari tahun 2002 sampai dengan tahun 2005 Kampung Tunggal Warga dipimpin oleh seorang pejabat (Pj) Kepala Kampung yaitu Bapak Satiyo dan pada tahun 2005 baru diadakannya pemilihan Kepala Kampung. Dan seiring berjalannya waktu Pada tahun 2005 sampai

dengan 2012 kepala Desa Tunggal Warga di jabat kembali oleh bapak Satiyo.

Desa Tunggal Warga telah mengadakan pemilihan sebanyak 3x dan yang paling lama menjabat sebagai kepala Desa adalah bapak Satiyo yaitu dari tahun 1996 sampai 2012. Setelah bapak Satiyo tidak menjabat lagi pada tahun 2012 lalu diadakan kembali pemilihan Kepala Desa yang ke 3 yang di menangkan oleh bapak Bahrin yang menjabat sebagai Kepala Desa hingga saat ini.

Berdasarkan data dalam bentuk tabel diatas, Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung telah mengalami pergantian Kepala Desa sebanyak tiga kali sejak tahun 1988 hingga saat ini tahun 2018.

a. Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung saat ini telah terbagi menjadi 8 dusun antara lain dusun I yang terdiri atas 4 RT, dusun II terdiri dari 4RT, dusun 3 terdiri dari 6 RT, dusun 4 terdiri 7 RT, dusun 5 terdiri dari 4 RT, dusun 6 terdiri 5 RT, dusun 7 terdiri dari 7 RT, dusun 8 terdiri dari 7 RT, dengan total keseluruhannya terdiri dari 44 RT dikeseluruhan Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, Kabupaten Tulang Bawang.

b. Visi dan Misi Desa Tunggal Warga

Demokrasi memiliki makna bahwa penyelenggaraan dan pelaksanaan pembangunan di desa harus mengkomodasi apresiasi dari masyarakat yang ada sebagai mitra pemerintah desa yang mampu mewujudkan peran aktif masyarakat. Agar masyarakat

senantiasa memiliki dan turut serta bertanggung jawab terhadap perkembangan kehidupan bersama sebagai sesama warga desa sehingga diharapkan adanya peningkatan hidup dan kesejahteraan masyarakat melalui penetapan kebijakan, program dan kegiatan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat.

Atas dasar pertimbangan di atas, maka untuk jangka waktu 6 (enam) tahun menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan dapat benar-benar bersarkan prinsip kebutuhan dan partisipasi masyarakat sehingga secara bertahap Desa Tunggal Warga dapat mengalami kemajuan. Untuk itu perlu adanya Visi dan Misi untuk sebuah tujuan

1) Visi Desa

Mewujudkan Desa Tunggal Warga menjadi Desa yang aman dan desa yang maju dalam segala bidang dan menjadikan masyarakat cerdas serta mandiri dalam bidang apapun.

Visi tersebut merupakan suatu tujuan dari suatu niat yang luhur untuk menyelenggarakan dan memperbaiki pelaksanaan pembangunan di Desa Tunggal Warga secara individu maupun kelembagaan, sehingga dalam 6 (enam) tahun kedepan Desa Tunggal Warga mengalami suatu perubahan yang lebih baik dan peningkatan kesejahteraan masyarakat dilihat dari segi

ekonomi dan pembangunan dengan dilandasi semangat kebersamaan dan pelaksanaan pembangunan.

2) Misi Desa

a) Bersama masyarakat memperkuat kelembagaan yang ada di Desa Tunggal Warga

b) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa menyelenggarakan pemerintahan dan melaksanakan pembangunan yang partisipatif

c) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa dalam mewujudkan Desa Tunggl Warga yang aman, tentram dan damai

d) Bersama masyarakat dan kelembagaan desa memberdayakan masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penigkatan kelompok usaha rumahan dan pertanian

e) Bersama lembaga desa dan kelompok tani meningkatkan hasil pertanian guna meningkatkan kesejahteraan petani

2. Keadaan Demografi

a. Luas dan Batas Wilayah

1) Luas Wilayah : 408 Ha.

2) Batas Wilayah :

Sebelah Utara : Desa Purwa Jaya

Sebelah Selatan : Desa Banjar Agung

Sebelah Barat : Desa Makmur Jaya
Sebelah Timur : Desa Dwi Warga Tunggal
Jaya

b. Kondisi Geografis :

- 1) Ketinggian Tanah : 15 Meter di atas permukaan laut
- 2) Banyaknya Curah Hujan : 1.960 mm/thn.
- 3) Topografi : Dataran Tinggi.
- 4) Suhu Udara rata-rata : 30 C.

c. Orbitasi

- 1) Jarak dari Kecamatan : 3 Km.
- 2) Jarak dari Ibu Kota Kab. : 30 Km.
- 3) Jarak dari Ibu Kota Prov. : 160 Km.
- 4) Jarak dari Ibu Kota Negara : 1.050 Km.

Pertahanan

1. Status :

- a. Sertifikat hak milik : - Bh./ Ha.
- b. Sertifikat HGU : -
- c. Sertifikat HGB : -
- d. Sertifikat Hak Pakai : -
- e. Tanah Kas Desa : -
- f. Tanah bersertifikat : 765
- g. Tanah bersertifikat Prona : 210

h. Tanah belum bersertifikat : 100

2. Peruntukan:

- a. Jalan : 56.800 m.
- b. Perkebunan : 179.5 Ha.
- c. Bangunan Umum : 6 Ha.
- d. Empang : -
- e. Pemukiman atau Perumahan : 211.5 Ha.
- f. Jalur hijau : -
- g. Makam : 0.5 Ha.
- h. Lain-lain : -

3. Penggunaan

- a. Industri : -
- b. Pertokoan/ perdagangan : -
- c. Perkantoran : 0.5 Ha.
- d. Pasar Desa : -
- e. Tanah Wakaf : -
- f. Tanah Sawah : -
- g. Tanah Kering :
 - 1) Pekarangan : 10 Ha.
 - 2) Peladangan : 9 Ha.

Kependudukan

1. Jumlah Penduduk Menurut :

a. Jenis Kelamin

| | | |
|--------------|---|------------|
| 1) Laki-laki | : | 2.477 Org. |
| 2) Perempuan | : | 2.369 Org. |
| Jumlah | : | 4.846 Org. |

b. Kepala Keluarga : 1.183 KK.

2. Agama dan tempat ibadah Desa Tunggal Warga

a. Islam : 75 %

Masjid/mushola : 14 unit

b. Kristen dan khatolik : 24.5 %

Gereja : 2 unit

c. Hindu : 0.3 %

Pura : -

d. Budha : 0.2 %

Vihara : 1 unit

Berdasarkan dari data di atas, masyarakat Desa Tunggal Warga yang beragama islam mencapai 75%, dan mempunyai tempat ibadah yang berupa masjid dan mushola dengan jumlah 14 unit tempat ibadah. Warga yang menganut agama Kristen dan khatolik berjumlah 24.5 % dan mempunyai 2 tempat ibadah

yang berupa gereja. Warga penganut hindu berjumlah 0.3 % akan tetapi untuk masyarakat hindu tidak ada tempat ibadah yang berupa pura, biasanya mereka hanya membuat pura kecil yang hanya bisa digunakan untuk tempat ibadah pribadi/sendiri. dan yang terakhir pemeluk agama budha yang berjumlah 0.2 % dengan memiliki 1 vihara.

3. Jumlah penduduk menurut usia

a. Kelompok pendidikan

| | | | |
|-----------------|---|-------|------|
| 1) 00- 03 tahun | : | 205 | Org. |
| 2) 04- 06 | : | 175 | Org. |
| 3) 07- 12 | : | 378 | Org. |
| 4) 13-15 | : | 207 | Org. |
| 5) 16- 18 | : | 198 | Org. |
| 6) 19- Keatas | : | 3.650 | Org. |

b. Kelompok tenaga kerja

| | | | |
|-----------------|---|-----|------|
| 1) 10- 14 tahun | : | - | |
| 2) 15- 19 | : | 126 | Org. |
| 3) 20- 26 | : | 205 | Org. |
| 4) 27- 40 | : | 473 | Org. |
| 5) 41- 56 | : | 686 | Org. |
| 6) 57- Keatas | : | 155 | Org. |

4. Jumlah penduduk menurut tenaga pendidikan

| | | | |
|----------------------|---|-------|------|
| a. Taman kanak-kanak | : | 657 | Org. |
| b. Sekolah dasar | : | 1.004 | Org. |
| c. Smp/slta | : | 829 | Org. |
| d. Sma/smk | : | 115 | Org. |
| e. Sarjana (S1-S2) | : | 71 | Org. |

5. Jumlah pendidikan menurut mata pencaharian

| | | | |
|----------------|---|-----|------|
| a. Karyawan : | | | |
| 1) PNS | : | 44 | Org. |
| 2) ABRI | : | 10 | Org. |
| b. Wiraswasta | : | 218 | Org. |
| c. Tani | : | 362 | Org. |
| d. Pertukangan | : | 15 | Org. |
| e. Buruh tani | : | 25 | Org. |
| f. Nelayan | : | - | |
| g. Pemulung | : | 10 | Org. |

B. Sistem Jual Beli Pohon Karet di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain

menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati kedua belah pihak.

Dibenarkan *syara'* dalam artian baik berupa proses atau objek yang di perjual belikan. Benda yang di perjual belikan harus dapat diserahkan terimakan dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*

Dalam sistem, Praktek jual beli pohon karet dengan penangguhan pembayaran di desa Tunggal Warga. Dalam sistem nya Pembeli mencari calon penjual yang akan menjual pohon karetnya.⁷¹ Begitupun sebaliknya terkadang penjual mencari pembeli untuk menjual pohon karetnya, karena pohon karet tersebut sudah tidak dapat menghasilkan getah.⁷² Selanjutnya terjadilah negoisasi yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika harga sudah dirasa cocok, maka dilanjutkan dengan memeriksa langsung ke kebun karet tersebut untuk melihat langsung kondisi pohon karet tersebut. Jika layak dan sesuai keinginan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah perjanjian yang dimana pembayaran akan dilakukan setelah penebangan karet itu selesai, dan dalam perjanjian tersebut tidak ada kepastian kapan penyelesaian penebangan pohon tersebut dan hanya

⁷¹ Goyon, Pembeli, Sabtu 28 April 2018

⁷² Lihin, Penjual, Senin 14 Mei 2018

mengira-ngira,2 sampai 3 bulan dan dalam transaksi tersebut hanya menggunakan kwitansi bahkan terkadang hanya menggunakan lisan.⁷³

C. Pelaksanaan Praktik Jual Beli Pohon Karet di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

Desa Tunggal Warga merupakan salah satu desa dimana sebagian besar berprofesi sebagai petani karet, dari hasil karet mereka gunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari mereka dari kebutuhan sekolah dan kebutuhan lainnya.⁷⁴ Akan tetapi tidak selamanya pohon karet menghasilkan getah, apabila umur karet sudah tua atau sudah lebih dari 10 tahun biasanya pohon karet sudah tidak menghasilkan getah, dan satu-satunya jalan guna untuk melangsungkan hidup yaitu dengan menebangnya dan akan di ganti dengan bibit yang baru atau dengan tanaman yang baru.⁷⁵ dalam prakteknya penjual mencari calon pembeli atau bahkan sebalikny, dengan sistem borongan atau dibeli dengan luas tanah karet tersebut. dalam prakteknya 1 hektar pohon karet dijual dengan harga 7 juta atau sesuai dengan kondisi pohon karet tersebut.

Jual beli pohon karet yang berlangsung di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung telah berlangsung cukup lama kurang lebih 10 tahun. Karena pemasaran pohon karet merupakan jenis kayu yang tingkat konsumsinya tinggi. Pohon karet biasanya di jual di pabrik untuk pembuatan triplek dan biasanya juga kayu pohon karet tersebut di jual di rumah makan untuk di jadikan kayu bakar. Ranting kayu pohon karet pun

⁷³ Bowo, Penjual, Senin 21 Mei 2018

⁷⁴ Tumirin, Penjual, Wawancara, Rabu 09 Mei 2018

⁷⁵ Wandu, Penjual, Wawancara, Rabu 18 April 2018

bisa di jual ke masyarakat guna untuk memasak.⁷⁶

Dalam pelaksanaan transaksi jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga ini dilakukan cukup baik atau bahkan saling membutuhkan satu sama lain. Pembeli mencari calon penjual, atau penjual mencari pembeli untuk menjual pohon karetnya, karena pohon karet tersebut sudah tidak dapat menghasilkan getah.⁷⁷ Selanjutnya terjadilah negoisasi yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika harga sudah dirasa cocok, maka dilanjutkan dengan memeriksa langsung ke kebun karet tersebut untuk melihat langsung kondisi pohon karet tersebut. Jika layak dan sesuai keinginan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah perjanjian sederhana.⁷⁸

Tidak semua transaksi jual beli pohon karet menggunakan perjanjian tertulis. Kebanyakan dari mereka hanya menggunakan nota bukti pembayaran sederhana, dan bahkan ada pula yang tidak menggunakan sama sekali hanya dengan lisan. Adanya bukti pembayaran walaupun hanya sederhana tetapi telah membuktikan bahwa telah terjadinya transaksi. Hal ini tentu saja sesuatu yang harus di tingkatkan dalam transaksi jual beli.⁷⁹

Hal-hal yang menjadi pertimbangan selanjutnya adalah rusaknya tanaman-tanaman yang ada disekitar pohon karet yang ditebang.⁸⁰ Hal ini

⁷⁶ Sutris, Pembeli, Wawancara, Senin 23 April 2018

⁷⁷ Siswadi, Penjual, Wawancara, Selasa 24 April 2018

⁷⁸ Sutris, *Op. Cit.*,

⁷⁹ Sahroni, Penjual, Wawancara, Sabtu 20 April 2018

⁸⁰ Supandri, Penjual, Wawancara, Rabu 28 Maret 2018

yang sering terjadi namun hal ini sudah biasa dan tidak bisa dihindarkan, meskipun dapat merugikan dan tidak ada ganti rugi dari kerusakan itu. Namun hal itu tidak dapat dihindarkan dan hanya dapat di maklumi.⁸¹ Dari pihak pembeli pun biasanya mengalami kerugian yang berupa terlalu kecilnya ukuran pohon karet tersebut, atau busuknya pohon karet yang diketahui setelah di tebang, hal ini juga bisa merugikan pembeli, pohon karet yang ukuran kecil juga tidak bisa di jual di pabrik dan hanya bisa digunakan untuk kayu bakar.⁸²

Biasanya juga dalam transaksi jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga penjual memberikan hak kepada pembeli untuk mengelola tanah mereka dengan alasan, karena setelah proses selesainya penebangan banyak hal yang harus dikerjakan yaitu membakar ranting pohon dan masih banyak lainnya.⁸³ Hal ini sangat di manfaatkan oleh pembeli, biasanya lahan/ tanah nya oleh pembeli di bersihkan terlebih dahulu lalu di Tanami pohon singkong dalam satu musim panen.⁸⁴

Keseluruhan proses inilah merupakan proses transaksi jual beli pohon karet pada umumnya yang terjadi di Desa Tunggal Warga. Walaupun ada beberapa hal yang kurang tepat dalam pelaksanaannya, namun karena sudah menjadi kebiasaan dan kewajiban, proses jual beli tersebut tetap berlangsung sampai sekarang. Hal ini juga melihat

⁸¹ Wagimin, Penjual, Wawancara, Selasa 08 Mei 2018

⁸² Goyon, *Op. Cit.*,

⁸³ Ayep, Penjual, Wawancara, Kamis 29 April 2018

⁸⁴ Goyon, *Ibid.*,

banyaknya kebutuhan hidup penjual pohon karet guna melangsungkan hidup.⁸⁵

D. Faktor-faktor Penyebab Terjadinya Sistem Tangguh Dalam Jual Beli Pohon Karet Tersebut

Setiap kejadian yang sudah menjadi tradisi di tengah masyarakat tentu ada hal yang melatar belakangi dan menjadi faktor-faktor dalam penangguhan pembayaran. Tidak semua transaksi itu berjalan sesuai keinginan kita, sama hal nya dengan suatu pekerjaan, karena kita hanya manusia biasa tidak bisa melihat sesuatu yang akan terjadi menimpa kita kedepannya. Begitu juga dengan transaksi jual beli pohon karet banyak faktor-faktor yang tak terduga atau yang tidak bisa kita hindari misalnya:

1. Tidak adanya uang atau modal yang mengakibatkan terjadinya perjanjian dimana pembayarannya di berikan setelah selesai penebangan
2. Sakit

Sakit adalah sesuatu yang tidak bisa kita hindari karena sudah merupakan takdir dari Allah SWT. Hal ini tentunya bisa menghambat penyelesaian penebangan yang berakibat tertundanya pembayaran pohon karet tersebut.

3. Kondisi Cuaca yang tidak menentu

Jika terjadi hujan sehari-hari tentulah bisa merugikan baik penjual dan pembeli di karenakan akibat hujan mobil tidak bisa beroperasi, karena jalan yang licin yang mengakibatkan mobil tidak bisa masuk ke area tersebut.

⁸⁵ Supri, Penjual, Wawancara, Minggu 29 April 2018

4. Mobil Rusak

Mobil yang rusak juga dapat mengakibatkan penundaan penebangan yang dimana mobil adalah alat transportasi untuk menjual pohon karet yang sudah di tebang.

5. Antrian Pabrik

Antrian pabrik tidak bisa dihindarkan karena banyaknya penjual yang mengakibatkan terjadinya antrian panjang dan biasanya juga bisa menginap di pabrik tersebut.⁸⁶



⁸⁶ Goyon, *Op. Cit.*,

BAB IV

ANALISIS DATA

A. Pelaksanaan Berdasarkan Praktik Jual Beli Pohon Karet dengan Sistem Tangguh

Berdasarkan penjabaran pada sub bab sebelumnya yang terkait dengan sistem jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung, penulis berusaha untuk menganalisa secara rasionalistik pembenturan masalah ini sehingga dapat mudah untuk dipahami.

Kegiatan jual beli sudah merupakan sarana untuk memenuhi kebutuhan di Desa Tunggal Warga. Jual beli tidak hanya sebagai kegiatan ekonomi semata, namun juga menjadi wadah untuk berinteraksi dan bersosialisasi antar warga sekitar. Selain itu, jika dilihat dari data yang telah dikumpulkan bahwa warga Desa Tunggal Warga mayoritas sebagai petani karet.

Pada dasarnya jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga sudah menggunakan cara cukup baik, dimana penjual mencari pembeli begitupun sebaliknya pembeli mencari penjual. Namun jika dilihat secara seksama, terdapat hal-hal yang kurang sesuai dengan aturan dan syarat-syarat jual beli, khususnya dalam penangguhan pembayaran pohon karet tersebut. Hal ini tentu saja akan berdampak pada kerugian pada salah satu ataupun kedua belah pihak penjual dan pembeli.

Sekilas memang transaksi jual beli tersebut jika ditela'ah merupakan perjanjian yang wajar dalam konteks dunia kerja secara umum. Hal ini dikarenakan jika diamati perjanjian ini sekilas sama dengan bentuk usaha biasanya dimana pembeli datang dan menawar harga yang sesuai kepada penjual pohon karet. Penjual tentu saja memiliki kebebasan dalam memutuskan apakah ia mau menjualnya atau tidak. Jika telah di sepakati, maka proses jual beli selanjutnya bisa langsung dilakukan. Jika perlu, maka perjanjian tertulis dibuat. Walaupun tidak sering hanya menggunakan kwitansi pembayaran bahkan terkadang hanya sebatas lisan. perjanjian jual beli tersebut telah disepakati oleh kedua belah pihak dimana tidak ada unsur pemaksaan di kedua belah pihak dan dilaksanakan atas dasar suka sama suka. Walaupun perjanjian tersebut dibuat berdasarkan dengan kesepakatan bersama, namun dalam praktiknya dilapangan, masih banyak kekurangan yang perlu kiranya dibahas agar permasalahan ini dapat diungkapkan dengan jelas.

Jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda dengan benda, atau benda dengan uang dengan jalan melepaskan hak milik dari yang satu kepada yang lain serta mempunyai nilai secara ridha di antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lain menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang telah dibenarkan *syara'* dan telah disepakati kedua belah pihak.

Menurut *syara'*, bahwa proses atau objek yang di perjual belikan dapat dibenarkan. Benda yang di-perjual belikan harus dapat diserahkan

dan merupakan milik sendiri dan bukan milik orang lain. Benda dapat mencakup pengertian barang dan uang, sedangkan sifat benda tersebut harus dapat dinilai, yakni benda-benda yang berharga dan dapat dibenarkan penggunaannya menurut *syara'*.

Hal yang menjadi sorotan pertama adalah ada atau tidak adanya perjanjian tersebut. Dari data yang telah terkumpul terlihat walaupun perjanjian beberapa kali dibuat, akan tetapi seringkali perjanjian hanya berbentuk lisan dan hanya menggunakan kwitansi pembayaran semata. Hal ini tentu saja bisa berbahaya dan dapat menimbulkan permasalahan ke depannya. Kwitansi pembayaran hanya dapat menunjukkan harga dan luas pohon karet yang dibeli, namun tidak dapat menerangkan hal-hal yang menjadi ketentuan-ketentuan tambahan mengenai hal-hal yang mungkin terjadi atau tidak sesuai dengan kenyataan.

Dalam perjanjian tersebut, menyebutkan waktu pembayarannya, pembayaran akan dilakukan jika proses penebangannya selesai, penyelesaiannya penebangan itu tidak pasti dan hanya bisa mengira-ngira 2 sampai 3 bulan. terlebih lagi adanya penundaan waktu penebangan karena adanya berbagai faktor. Dalam hal ini pembeli memiliki hak penuh dan penjual tidak mempunyai hak sama sekali terhadap waktu penyelesaian penebangan pohon karet tersebut. Jika pohon karet tidak disegerakan penyelesaian penebangannya, tentu saja pihak penjual sangatlah rugi, karena tanah yang seharusnya dapat digunakan kembali, harus tertahan belum lagi terjadi penangguhan pembayaran yang akan di bayar setelah

selesai penebangan pohon karet tersebut. Sehingga hal ini sangatlah merugikan karena uang pembayaran pohon karet tersebut sangatlah di tunggu-tunggu untuk memenuhi kebutuhan pokok dan keperluan sekolah.

Selain itu, adanya sesuatu yang seharusnya diperhatikan dan dibicarakan dalam proses jual beli pohon karet tersebut yaitu adanya kerusakan tanaman-tanaman disekitar penebangan pohon karet tersebut misalnya pohon coklat, albasia, dan jalan menjadi rusak, dll. Yang seharusnya menjadi perhatian dalam proses jual beli tersebut. Karena hal ini sering terjadi dibiarkan dan tidak adanya pertanggung jawaban ganti rugi meskipun hal ini sudah jelas merugikan salah satu pihak.

B. Tinjauan Hukum Islam Tentang Praktik Jual Beli Pohon Karet Dengan Sistem Tangguh di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung Kabupaten Tulang Bawang

Jual beli memiliki beberapa persyaratan yang harus sepenuhnya dipenuhi agar akad jual beli menjadi sah. Diantara syarat-syarat tersebut ada yang berkaitan dengan pihak-pihak yang terlibat ada yang berkaitan dengan barang yang dijual belikan serta keberadaan barang tersebut harus suci, bermanfaat, dan bisa diserahkan serta merupakan milik penjual. Ketika terjadi akad, kemudian tidak ada pembatasan waktu. Dari berbagai penjelasan diatas mengenai akad jual beli, baik rukun akad, syarat akad, klasifikasi akad dan sebagainya. dapat dijadikan pengantar untuk lebih jelas membahas mengenai akad borongan.

Akad borongan menurut *Mali-kiyah* diperbolehkan jika barang tersebut bisa ditakar, ditimbang atau secara borongan tanpa ditimbang,

ditakar atau dihitung lagi, namun dengan beberapa syarat yang dijelaskan secara rinci oleh kalangan *Mali-kiyah*.

Secara umum, Islam tidak hanya mengajarkan para umatnya untuk memfokuskan diri pada hal-hal yang bersifat ibadah semata, namun juga menjadi panduan manusia dalam berperilaku sehari-hari. Panduan tersebut secara garis besar diatur oleh Hukum Syari'ah. Salah satu bagian dari hukum syari'ah adalah mu'amalah. Hukum *mu'amalah* merupakan hukum-hukum yang mengatur hubungan seseorang dengan sejenisnya, seperti jual beli, sewa-menyewa, gadai menggadai, syirkah, utang piutang, dan hukum perjanjian. Hukum-hukum jenis ini mengatur hubungan perorangan, masyarakat, hal-hal yang berhubungan dengan harta kekayaan, dan memelihara hak dan kewajiban masing-masing.

Islam mengatur umatnya tentang cara bertransaksi yang baik antar sesama. Semua pekerjaan yang dilakukan tidak boleh keluar dari jalur yang telah ditetapkan, sehingga masing-masing pihak tidak ada yang merasa dirugikan dan tidak ada yang merasa menyesal dikemudian hari. Sama halnya dengan jual beli ini. Ibnu Qodamah menyatakan bahwa secara *ijma'* jual beli secara tangguh tidak diharamkan. Jual beli tertangguh merupakan salah satu jual beli yang diisyaratkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara tangguh adalah boleh. Sementara penangguhan pembayaran dilakukan dengan syarat apabila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui penangguhan pembayaran tersebut.

Oleh karena itu, membicarakan permasalahan tinjauan atau perspektif mengenai suatu hal, maka akan timbul berbagai macam tafsiran yang sepihak dan lebih subjektif. Terlebih lagi apalagi membincangkan dari arah perspektif hukum Islam, akan mungkin sangat terjadi benturan terutama dengan realita yang ada di masyarakat. Hal inilah juga yang akan menjadi pertimbangan dalam menganalisa proses jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga.

Seperti yang telah diungkapkan sebelumnya, bahwa transaksi jual beli ini sering hanya menggunakan kwitansi pembelian semata tidak menunjukkan ketentuan-ketentuan yang jelas dalam pelaksanaannya atau bahkan ada yang hanya dengan lisan dan tanpa adanya bukti apapun karena unsur kepercayaan yang sudah dibangun. Hal ini tentu saja bertentangan dengan ketentuan dasar bermu'amalah yang tercantum dalam surat Al-Baqarah ayat 282:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى
فَاكْتُبُوهُ وَلْيَكْتُب بَيْنَكُمْ كَاتِبٌ بِالْعَدْلِ وَلَا يَأْبَ كَاتِبٌ أَنْ
يَكْتُبَ كَمَا عَلَّمَهُ اللَّهُ

Artinya: “Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. Dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya.”

Ayat tersebut dengan jelas mensyariatkan dalam kegiatan mu'amalah termasuk jual beli harus di dampingi dengan adanya bukti yang tertulis yang dapat menjelaskan setiap ketentuan-ketentuan yang berhubungan dengan kegiatan mu'amalah tersebut. selain itu, salah satu asas perjanjian menurut hukum Islam adalah adanya asas Al-Kitabah yang menjelaskan bahwa hendaknya suatu perjanjian dilakukan secara tertulis dan di lihat oleh saksi-saksi.

Salah satu syarat sahnya jual beli *Bidhamanil Ajil* yaitu waktu pembayarannya ditentukan dengan secara pasti, seperti dengan menyebut periode dengan spesifik. Jika waktu pembayarannya tidak ditentukan secara spesifik, maka akad jual beli ini batal adanya. Dalam jual beli pohon karet ini barang sudah diberikan namun pembayaran ditangguhkan sampai selesai penebangan dan dalam penyelesaian hanya mengira-ngira 2 sampai 3 bulan tanpa ada kepastian yang jelas, hal inilah yang jelas tidak memenuhi syarat sahnya akad jual beli dikarenakan tidak adanya kejelasan penyelesaian penebangan . Berdasarkan inilah bahwa transaksi jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga sebagian besar belum sesuai dengan hukum Islam.

Salah satu syarat dan rukun jual beli yang lain adalah barang yang di perjual belikan harus dapat diketahui takaran maupun timbangannya dan dapat dihargaikan. Akan tetapi jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga ini jika dilihat dari segi kejelasan takaran barang yang di perjual belikan juga tidak begitu jelas karena dalam jual belinya memakai sistem

borongan yang dimana tidak memandang besar atau kecilnya ukuran pohon karet tersebut dan dihargai dengan satu harga. Pertimbangan yang hanya mengira-ngira dan mentaksir harga jelas tidak menunjukkan kejelasan takaran yang ada.

Selain itu, dalam proses jual beli tersebut tidak diperbolehkan adanya salah satu pihak yang merasa dirugikan. Jika dilihat dari penjual dengan tidak ada kepastian penyelesaian penebangannya yang semata-mata hanya mengira-ngira dan belum ada kepastian, maka sudah jelas terdapat unsur kerugian terutama pada pihak penjual karena ia tidak dapat mengelola lahan/tanah miliknya selama pohon belum selesai penebangannya. Belum lagi ketika ada tanaman di sekitar yang tertimpa pohon karet saat penebangan. Di sisi lain, ukuran pohon yang tidak merata besarnya hal ini juga bisa berakibat kerugian, meskipun tanggung jawab atau resiko tersebut di tanggung oleh pembeli. Padahal jelas dalam hukum Islam harus mempunyai prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Prinsip Tauhidi

Yaitu bahwa dalam setiap gerak langkah serta bangunan hukum harus mencerminkan nilai-nilai ketuhanan.

2. Prinsip Halal

Karena Allah memerintahkan untuk mencari rejeki dengan cara yang halal.

3. Prinsip Masalah

Maslahah adalah sesuatu yang ditunjukkan oleh dalil hukum tertentu yang membenarkan atau membatalkannya atas segala tindakan manusia dalam mencapai tujuan *syara'*, yaitu memelihara agama, jiwa, akal, harta benda, dan keturunan.

4. Prinsip kebebasan bertransaksi

Yaitu prinsip kebebasan bertransaksi yang didasari prinsip suka sama suka dan tidak ada pihak yang di zalimi dengan didasari oleh akad yang sah.

5. Prinsip Kerja Sama, Prinsip transaksi didasarkan pada kerjasama yang saling menguntungkan dan solidaritas (persaudaraan dan saling membantu).

Perjanjian jual beli semacam ini bisa dikatakan tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam prinsip jual beli *Bidhamanil Ajil* dimana jual beli ini pembayarannya ditentukan dengan secara pasti dan menyebut periode pembayaran dengan spesifik. suatu perjanjian dalam Islam adalah suatu keharusan dalam mendatangkan faedah baik dari segi akad dan barangnya bagi kedua belah pihak. Selain itu berdasarkan teori perjanjian dalam hukum Islam apabila menimbulkan suatu kerugian maka perjanjian tersebut menjadi batal atau rusak, sehingga akad ini tidak sah sifatnya menurut syari'at Islam walaupun telah memenuhi beberapa persyaratan lainnya.

Dalam kegiatan dalam bermu'amalah adalah untuk mewujudkan kemaslahatan bagi umat manusia, dengan memperhatikan dan mempertimbangkan berbagai situasi dan kondisi yang mengitari kehidupan manusia itu sendiri. Aturan-aturan tersebut telah dijelaskan secara konkrit dalam berbagai ketentuan hukum Islam dalam penggalian pemahaman dari Al-Qur'an dan As-Sunnah.

Para ulama fiqh juga mengemukakan beberapa syarat lain yang berkaitan dengan syarat sahnya jual beli. Para ulama fiqh menyatakan bahwa suatu jual beli baru dianggap sah apabila jual beli itu terhindar dari cacat, seperti kriteria barang yang diperjual belikan itu diketahui, baik jenis, kualitas maupun kuantitasnya, jumlah barang dan harga jelas, jual beli itu tidak mengandung unsur paksaan, unsur tipuan, mudharat, serta adanya syarat-syarat lain yang membuat jual beli itu rusak.

Oleh karena itu, transaksi jual beli pohon karet dengan sistem tangguh tersebut dimungkinkan tidak adanya kejelasan dalam sistem pembayarannya, belum lagi penyelesaian penebangan yang belum pasti. Selain itu, terjadinya kekurangan barang yang dapat berupa tidak meratanya ukuran besar pohon karet, ataupun kerusakan tanaman yang terjadi disekitar penebangan pohon karet tersebut. hal ini sudah jelas menunjukan bahwa dalam jual beli ini terdapat unsur-unsur mudharat dan kerugian yang telah menggagalkan syarat sahnya jual beli.

Dari pertimbangan inilah dapat dipahami bahwa transaksi jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam hukum Islam. Dalam hal kejelasan barangnya, dalam akad perjanjiannya, dan waktu penangguhan pembayarannya tidak pasti. Oleh karena itu, sesuatu yang berhubungan dengan jual beli dalam Islam perlu dimiliki oleh setiap muslim khususnya warga Desa Tunggal Warga dimana mayoritas nya adalah muslim, agar kegiatan dalam jual beli dan bermu'amalah dapat memberikan manfaat bukan hanya untuk memenuhi kehidupan di dunia saja, melainkan juga untuk mencari ridho Allah SWT.



BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan yang dilakukan oleh peneliti, tentang tinjauan hukum Islam terhadap praktek jual beli pohon karet di Desa Tunggal Warga Kecamatan Banjar Agung dapat di ambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Praktek jual beli pohon karet yang berlangsung di tengah masyarakat Desa Tunggal Warga dilakukan dengan cukup baik. Pembeli mencari calon penjual yang akan menjual pohon karetnya begitupun sebaliknya terkadang penjual mencari pembeli untuk menjual pohon karetnya, karena pohon karet tersebut sudah tidak dapat menghasilkan getah. Selanjutnya terjadilah negoisasi yang sesuai dengan kesepakatan bersama. Jika harga sudah dirasa cocok, maka dilanjutkan dengan memeriksa langsung ke kebun karet tersebut untuk melihat langsung kondisi pohon karet tersebut. Jika layak dan sesuai keinginan antara penjual dan pembeli, maka dibuatlah perjanjian, dimana dalam perjanjian tersebut akan dibayar setelah penebangan pohon karet tersebut selesai.
2. Dalam Hukum Islam praktek jual beli pohon karet tersebut dengan penangguhan pembayaran di Desa Tunggal Warga secara jelas tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli dalam hukum Islam. Dalam hal akad perjanjian, sering hanya menggunakan kwitansi pembelian atau

bahkan ada yang hanya menggunakan lisan. Selain itu, terdapat unsur mudharat atau kerugian dari salah satu pihak dan tidak adanya kejelasan dalam ukuran dan waktu penangguhan pembayaran secara pasti. Dari segi ukuran pun hanya mengira-ngira dan menyamakan keseluruhan pohon dengan satu harga. Oleh karena itu, dalam perspektif hukum Islam, pelaksanaan jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga tidak memenuhi syarat dan rukun jual beli yang sah dalam hukum Islam sehingga praktik jual beli tersebut tidak sah dan sudah selayaknya untuk dihindari.

B. Saran

Setelah melakukan penelitian dan mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktik jual beli pohon karet dengan sistem tangguh di Desa Tunggal Warga, Kecamatan Banjar Agung, penulis mempunyai saran demi terwujudnya kemaslahatan bersama, untuk masyarakat Desa Tunggal Warga sebagai berikut:

1. Harus adanya penyuluhan langsung oleh Kepala Desa untuk memberikan pengertian mengenai praktik jual beli yang baik dan benar dalam hukum Islam.
2. Kepada penjual dan pembeli khususnya agar dapat melaksanakan jual beli yang baik dan benar sesuai dengan syari'at Islam, sehingga tidak ada salah satu pihak yang merasa dirugikan, dan meninggalkan praktek tersebut yang sudah jelas di larang dalam hukum Islam.

3. Para pihak harus lebih memperhatikan etika dalam jual beli pohon karet sehingga tidak ada salah satu pihak yang dirugikan hak-haknya.
4. Kepada masyarakat khususnya Desa Tunggal Warga, perlunya pengetahuan tentang hukum Islam, sehingga masyarakat mengetahui hal-hal yang dilarang dan di perbolehkan khususnya dalam jual beli.



DAFTAR PUSTAKA

- Antonio, Muhammad Syafi'I. 2001. *Bank Syariah dari Teori dan Praktik*, Jakarta: Gema Insani.
- Ali, Hasan M. 2003. *Berbagai Macam Transaksi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Al-ghazali, Imam. 2002. *Benang Tipis antara Halal dan Haram*. Surabaya: Putra Pelajar.
- Al-munjid, Abu Luis Ma'luf. Tanpa tahun. Darul Masyriq.
- Arikunto, Suharsimi. 2006. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik Edisi Revisi III* Cet. Ke-4, Jakarta: Rineka Cipta.
- Badruddin al-Aini al-Hanafi, 'umdatul Qari Syarhu sahih al-Bukhari, (Digital library, al-Maktabah al-Syamillah al-Isdar al-Sani, 2005), XVII/289.
- Departemen Agama RI. Tanpa tahun. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra.
- Departemen Pendidikan Nasional. 1990. *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Ketiga*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Departemen pendidikan dan kebudayaan. 1997. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi ke-2, Cet. Kesembilan, Jakarta: Balai Pustaka.
- Djuwaini, Dimyauddin. *Pengantar Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Hadi, Sutrisno. 2006. *Metode Research II*, Yogyakarta.
- Hakim, Lukman. 2012. *Prinsip-prinsip Ekonomi Islam*. Jakarta: Erlangga.
- Hasan, M. Ali. 2003. *Berbagai Transaksi dalam Islam*. Jakarta: Erlangga.

Ja'far, A Kumaidi. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Bandar Lampung:
Permatet Publishing.

Kaelan. M.S. 2005. *Metode Penelitian Bidang Kualitatif Bidang Filsafat*
Yogyakarta : Paradigina.

Kartono, Kartini. 2004. *Pengantar Metodologi Riset Sosial*, Cet. Ke-VII,
Bandung: Mandar Maju.

Koentjaraningrat. 2004. *Metodologi Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia.

Manan, Abdul. 2012. *Hukum Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Kencana.

Mardalis. 2004. *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Cet. Ke-7.
Jakarta: Bumi Aksara.

Mardani. 2015. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Prenamedia Group.

_____. 2015. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Mustofa, Imam. 2016. *Fiqh Muamalah Kontemporer*. Jakarta: PT Rajagrafindo
Persada.

Muhammad bin Yazid Abu Abdillah al-Quzwaini, *Sunan Ibnu Majah*, (Digital
Library, al-Maktabah al-Syamilah al-Isdar al-Sani, 2005), II/737.

Narbuk, Cholid dan Abu Achmad. 1997. *Metodologi Penelitian*. Jakarta: Bumi
Aksara.

Praja, Juahaya S. 2012. *Ekonomi Syari'ah*. Bandung: Pustaka Setia.

Qaradhawi, Yusuf. 2009. *Halal dan Haram*. Jakarta: Rabbani Press.

Rachmat. 2001. *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.

Rasyid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.

Rozalinda. 2016. *Fiqh Ekonomi Syari'ah*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Sjahdeini, Sutan Remy. 2014. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prena Media Group.
- Soekanto, Soerjono. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*. Cet. Ke 2, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Solihin, Bunyana. 2016. *Kaidah Hukum Islam dalam Tertib dan Fungsi Legislasi Hukum dan Perundang-undangan*. Yogyakarta: Kreasi Total Media.
- Sudjana, Nana. 1996. *Pedoman Penyusunan Skripsi, Tesis dan Disertasi*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Sugiono, 2001. *Metode Penelitian Administrasi*, Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, Hendi. 2014. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: PT Rajagrafindo Persada.
- Syafe'i, Rahmad. 2006. *Fiqh Muamalah*. Bandung: CV. Pustaka Setia.
- Syah, Ismail Muhammad. 1999. *Filsafat Hukum Islam*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Syarifuddin, Amir. 1997. *Ushul Fiqh*. Jilid 1. Jakarta :Logos Wacana Ilmu.
- Yunus, Mahmud. 2007. *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Hidakarya Agung.